

DISERTASI

**PENCIPTAAN MODEL EVALUASI EFEKTIVITAS PELATIHAN
KEWIRASWASTAAN METODE CEFE DENGAN PENDEKATAN
LOGIC MODEL DAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA
PRAKTISI KEWIRASWASTAAN**

**Studi Kasus Pelatihan Kewiraswastaan Pada Wiraswastawan Di
Kawasan Solo Raya**

**Sawidji Widoatmodjo
A013182006**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**PENCIPTAAN MODEL EVALUASI EFEKTIVITAS PELATIHAN
KEWIRASWASTAAN METODE CEFE DENGAN PENDEKATAN
LOGIC MODEL DAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA
PRAKTISI KEWIRASWASTAAN**

**Studi Kasus Pelatihan Kewiraswastaan Pada Wiraswastawan
Di Kawasan Solo Raya**

disusun dan diajukan oleh

SAWIDJI WIDOATMODJO

A013182006

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 10 Oktober 2021

Promotor



Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA
NIP 194701151975031001

Kopromotor I



Prof. Dr. Indrianty Sudirman, S.E., M.Si
NIP 196901281999032001

Kopromotor II



Prof. Dr. Ria Mardiana Y, MSi
NIP 196705181992032001

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

PENCIPTAAN MODEL EVALUASI EFEKTIVITAS PELATIHAN KEWIRASWASTAAN METODE CEFE DENGAN PENDEKATAN LOGIC MODEL DAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA PRAKTIKI KEWIRASWASTAAN

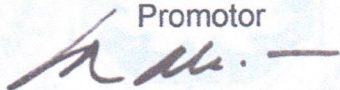
STUDI KASUS PELATIHAN KEWIRASWASTAAN PADA WIRASWASTAWAN DI KAWASAN SOLO RAYA

disusun dan diajukan oleh:


SAWIDJI WIDOATMODJO
AO13182006

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin pada tanggal 7 Maret 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor


Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA
NIP : 194701151975031001

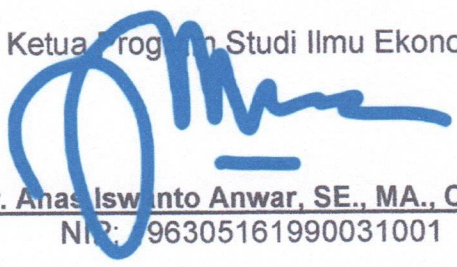
Copromotor I


Prof. Dr. Indrianty Sudirman, SE., M.Si
NIP:196901281999032001

Copromotor II


Prof. Dr. Ria Mardiana Y, SE., M.Si
NIP:196705181992032001

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi


Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM
NIP: 96305161990031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP: 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sawidji Widoatmodjo
NIM : A013182006
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yagn berjudul

PENCIPTAAN MODEL EVALUASI EFEKTIVITAS PELATIHAN KEWIRASWASTAAN METODE CEFE DENGAN PENDEKATAN LOGIC MODEL DAN BERBASIS KEBUTUHAN PESERTA PRAKTISI KEWIRASWASTAAN

Studi Kasus Pelatihan Kewiraswastaan Pada Wiraswastawan Di Kawasan Solo Raya

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah disertasi ini terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2, dan pasal 70)

Makassar, September 2021

_____ membuat pernyataan



(Sawidji Widoatmodjo)

PRAKATA

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT hasil penelitian disertasi ini dapat diselesaikan di bulan-bulan yang penuh keprihatinan akibat Pandemi Covid-19. Memang, perjalanan masih panjang, namun dengan selesainya hasil ini langkah yang panjang itu sudah ditapaki, yang merupakan ikhtiar untuk mencapai akhir perjalanan. Cukup banyak suka duka ketika menyelesaikan hasil penelitian ini, terutama dalam hal mengumpulkan data melalui wawancara nara sumber. Untuk pengumpulan data, pekerjaan melelahkan harus rela dilakukan dengan menelusuri lokasi-lokasi nara sumber, baik yang ada di kota maupun di desa. Untuk pembimbingan, meskipun selalu disertai hati berdebar, namun kebijaksanaan promotor dan co promotor yang kompak mampu menghilangkan rasa khawatir, sehingga bimbingan memberikan semangat untuk terus menyelesaikan usulan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah tentang penciptaan model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan metode CEFE. Permasalahan inti penelitian ini adalah bagaimana menemukan model yang sesuai untuk mengevaluasi suatu pelatihan kewiraswastaan untuk praktisi. Adapun kasus yang diangkat adalah pelatihan kewiraswastaan dengan metode CEFE, yaitu suatu metode pelatihan yang ditujukan untuk para praktisi kewiraswastaan. Pelatihan tersebut diselenggarakan di kawasan Solo Raya dengan peserta yang terdiri klaster batik, klaster mebel, klaster perdagangan, dan klaster susu. Karena penelitian ini menggunakan studi kasus, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode analisis induktif.

Ide penelitian ini berangkat dari pentingnya peran kewiraswastaan dewasa ini, sehingga memanggil banyak pihak untuk merasa berpartisipasi dalam pengembangan kewiraswastaan tersebut. Kalangan pendidikan, merasa terpanggil untuk membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan dan ketrampilan kewiraswastaan, sehingga materi kewiraswastaan menjadi menu penting dalam kurikulumnya. Sementara kalangan pemerintah berkepentingan mengembangkan kewiraswastaan untuk menolong membuka kesempatan kerja, yang sulit disediakan dengan biaya APBN. Pentingnya peran kewiraswastaan tersebut mendorong lahirnya kebijaksanaan mempromosikan kewiraswastaan. Salah bentuk promosi tersebut adalah pelatihan kewiraswastaan.

Sayangnya, pelatihan kewiraswastaan yang dijalankan dengan penuh semangat dan memerlukan biaya yang tidak sedikit tersebut, jarang diketahui hasilnya. Hal tersebut terjadi karena kegiatan pelatihan itu jarang dilakukan evaluasi. Minimnya evaluasi tersebut makin terasa

ketika pelatihan kewirawastaan merupakan bagian dari program kerja, sehingga orientasi pelaksanaan pelatihan hanyalah memenuhi program kerja. Karena itu, penelitian ini ingin mengisi ruang kosong tersebut dengan melakukan evaluasi efektivitas pelatihan kewirawastaan metode CEFE yang kebetulan diselenggarakan oleh pemerintah.

Selain, jarang dilakukan evaluasi, yang jauh lebih urgen adalah model yang digunakan untuk mengevaluasi tersebut belum tentu sesuai. Karena itu penelitian ini juga mencoba menemukan model evaluasi efektivitas pelatihan kewirawastaan untuk praktisi yang sesuai dengan metod CEFE.

Atas keberhasilan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang besar kepada beliau-beliau yang berandil besar pada selesainya usulan penelitian ini. Mereka adalah, *pertama*, Prof. Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA, sebagai promotor yang sangat bijaksana dan selalu memberikan ruang untuk berkreasi dalam penulisan usulan penelitian ini. *Kedua*, Prof. Dr. Indrianty Sudirman, S.E., M.Si, sebagai co promotor I yang selalu memberikan masukan kritis, sehingga penulis lebih terinspirasi untuk terus memperbaiki usulan penelitian ini. *Ketiga*, Prof. Dr. Ria Mardiana Y, M.Si, sebagai co promotor II yang dengan kesabaran tinggi selalu menerima gagasan penulis, meski selalu tidak sempurna sehingga memerlukan usulan perbaikannya. *Keempat*, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si CIPM, Dekan FEB Universitas Hasanuddin sekali gus dosen dan penguji, yang selalu membesarkan hati bahwa kami semua akan mampu menyelesaikan program Doktor, karena beliau sepenuhnya mendukung dengan fasilitas administrasi maupun proses perkuliahan dan pembimbingan. *Kelima*, Dr. Anas Iswanto Anwar, sebagai Ketua Program Studi yang mendorong dengan “provokasinya” dan fasilitasi semua hal yang membuat proses kuliah dan penulisan hasil penelitian terasa mudah. *Keenam*, semua dosen yang telah mendedikasikan kemampuannya untuk membuat penulis mampu menyelesaikan kuliah dan penulisan usulan penelitian.

Semoga Allah SWT memberkahi semua ilmu yang sudah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengamalkannya dalam kebaikan.

Jakarta, 10 Oktober 2021

ABSTRAK

SAWIDJI WIDOTMODJO. *Penciptaan Model Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE dengan Pendekatan Logic Model dan Berbasis Kebutuhan Peserta Praktisi Kewiraswastaan: Studi Kasus Pelatihan Kewiraswastaan pada Wiraswastawan di Kawasan Solo Raya* (dibimbing oleh Djabir Hamzah, Indrianty Sudirman, dan Ria Mardiana Y.).

Penelitian ini bertujuan menghasilkan penciptaan model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan dengan menggunakan metode CEFE dan menjelaskan efektivitas pelatihan kewiraswastaan dengan model CEFE yang dievaluasi dengan model evaluasi yang diciptakan.

Penelitian ini menggunakan empat metode. *Pertama*, metode meta analisis, yakni metode yang difungsikan untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan dan mendapatkan dimensi pelatihan yang dibutuhkan pada saat pelatihan kewiraswastaan. *Kedua*, metode kuantitatif berupa survei, yang difungsikan untuk menentukan kebutuhan peserta dari kalangan praktisi kewiraswastaan sekaligus dijadikan indikator pengukuran efektivitas. *Ketiga*, metode meta evaluasi yang digunakan untuk menguji kelayakan model yang tercipta. *Keempat*, metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan digunakan untuk mendapatkan konfirmasi hasil pelatihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang tercipta adalah model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan dengan pendekatan *logic model* dan berbasis kebutuhan peserta pelatihan. Model ini memenuhi kelayakan sebagai model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan dengan model CEFE. Hasil pelatihan menunjukkan para peserta merasakan efektivitas pelatihan kewiraswastaan metode CEFE.

Kata kunci: evaluasi, efektivitas, kewiraswastaan, pelatihan



ABSTRACT

SAWIDJI WIDOATMODJO. *The Creation of a Model for Evaluation of the Effectiveness of Entrepreneurship Training with CEFE Method with a Logic Model Approach and Based on the Needs of Entrepreneurial Practitioners: A Case Study of Entrepreneurship Training for Entrepreneurs in Solo Raya Area* (supervised by **Djabir Hamzah, Indrianty Sudirman, and Ria Mardiana Y.**)

The aim of this study is to create a model to evaluate the effectiveness of CEFE method of entrepreneurship training, and show how the effectiveness of CEFE method of entrepreneurship training evaluated with the created evaluation model.

The research used four methods. First, meta-analysis method was used to determine the approach used by the model and obtain the training dimensions needed for entrepreneurship training. Second, quantitative method in the form of a survey was used to determine the needs of participants among entrepreneurship practitioners as an indicator of measuring effectiveness. Third, meta-evaluation method was used to test the feasibility of the created model. Fourth, qualitative method in the form of in-depth interviews was used to confirm the results of the training.

The results indicate that the model created is a model to evaluate the effectiveness of entrepreneurship training with a logic model approach and based on the needs of the participants. This model meets the feasibility as a model to evaluate the effectiveness of the CEFE method of entrepreneurship training. The results of the training show that the participants feel the effectiveness of the CEFE method of entrepreneurship training.

Keywords: evaluation, effectiveness, entrepreneurship, training



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH/SIMBOL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.4.3 Kegunaan Kebijakan	11
1.5 Sistematikan Penulisan.....	12
Bab II Tinjauan Pustaka.....	20
2.1 Definisi Kewiraswastaan.....	22
2.2 Peran Kewiraswastaan Dalam Pembangunan Ekonomi.....	29
2.3 Pelatihan Kewiraswastaan.....	33
2.4 Peran Pemerintah Dalam PPK.....	42
2.5 Efektivitas Program PPK.....	45
2.6 Evaluasi Efektivitas Program PPK.....	48
2.7 Model Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan	50
2.8 Penelitian Terdahulu.....	52
BAB III Model Evaluasi Efektivitas Metode Pelatihan Kewiraswastaan.....	61
3.1 Pembentuk Hasil Pelatihan Kewiraswastaan	70
3.2 Pengukuran	71
3.2.1 Pengukuran Konteks Program.....	73
3.2.2 Pengukuran Karakteristik Peserta	76
3.2.3 Pengukuran Karakteristik Program.....	81
3.2.4 Pengukuran Hasil.....	85
3.4 Rangkuman.....	88

BAB IV Model Analisis.....	92
4.1 Pendahuluan.....	92
4.2 Indikator Pengukuran yang Dianggap Penting.....	92
4.3 Model Penelitian.....	98
4.3.1 Pendekatan <i>Logic Model</i>	99
4.3.2 Berbasis Kebutuhan Peserta.....	99
4.3.3 Indikator Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan.....	104
4.3.4 Pengukuran efektivitas.....	105
4.3.5 Penetapan Efektivitas.....	106
4.4 Hubungan Antar Dimensi.....	108
4.4.1 Peran Konteks Program.....	110
4.4.2 Peran Karakteristik Peserta.....	115
4.4.3 Peran Karakteristik Program.....	121
4.4.4 Peran Hasil.....	124
4.5 Kerangka Pemikiran.....	129
 BAB V Metode Penelitian	 135
5.1 Desain dan Pendekatan Penelitian.....	135
5.2 Pemilihan Kasus.....	145
5.3 Unit Analisis.....	148
5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	149
5.5 Kasus.....	155
5.5.1 Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE	156
5.5.2 Peserta dan Proses Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE	158
5.6 Teknik Analisis Data.....	158
5.7 Reliabilitas.....	165
5.8 Validitas.....	168
5.8.1 Validitas Internal	173
5.8.2 Validitas Eksternal	175
5.8.3 Validitas Prosesual	176
 BAB VI Kelayakan Model Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE	 177
6.1 Pendahuluan.....	177
6.2 Kualitas Model Pemilihan Kasus.....	178
6.3 Hasil Uji Kelayakan Model.....	180
 BAB VII Kasus 1: Klaster Perdagangan.....	 188
7.1 Pendahuluan.....	188
7.2 Kebutuhan Praktisi Kewiraswastaan Klaster Perdagangan.....	191
7.3 Indikator Pengukuran.....	194
7.4 Indikator Efektivitas.....	197
7.4.1 Konteks Program.....	199
7.4.2 Karakteristik Peserta.....	218
7.4.3 Karakteristik Program.....	236
7.4.4 Hasil.....	276
7.5 Penetapan Efektivitas.....	317
7.6 Analisis & Kesimpulan.....	319

BAB VIII Kasus 2: Klaster Susu.....	325
8.1 Pendahuluan.....	325
8.2 Kebutuhan Praktisi Kewirawastaan Klaster Susu.....	328
8.3 Indikator Pengukuran.....	333
8.4 Indikator Efektivitas.....	336
8.4.1 Konteks Program.....	339
8.4.2 Karakteristik Peserta.....	353
8.4.3 Karakteristik Program.....	371
8.4.4 Hasil.....	416
8.5 Penetapan Efektivitas.....	457
8.6 Analisis & Kesimpulan.....	460
 BAB IX Kasus 3: Klaster Batik.....	 465
9.1 Pendahuluan.....	465
9.2 Kebutuhan Praktisi Kewirawastaan Klaster Susu.....	467
9.3 Indikator Pengukuran.....	471
9.4 Indikator Efektivitas.....	472
9.4.1 Konteks Program.....	473
9.4.2 Karakteristik Peserta.....	487
9.4.3 Karakteristik Program.....	506
9.4.4 Hasil.....	544
9.5 Penetapan Efektivitas.....	584
9.6 Analisis & Kesimpulan.....	586
 BAB X Kasus 4: Klaster Mebel.....	 591
10.1 Pendahuluan.....	591
10.2 Kebutuhan Praktisi Kewirawastaan Klaster Susu.....	593
10.3 Indikator Pengukuran.....	595
10.4 Indikator Efektivitas.....	596
10.4.1 Konteks Program.....	598
10.4.2 Karakteristik Peserta.....	606
10.4.3 Karakteristik Program.....	615
10.4.4 Hasil.....	641
10.5 Penetapan Efektivitas.....	675
10.6 Analisis & Kesimpulan.....	677
 BAB XI Perbandingan dan Diskusi Hasil Studi Kasus.....	 683
11.1 Pendahuluan.....	683
11.2 Karakteristik Umum Studi Kasus.....	684
11.3 Perbandingan Evaluasi Efektivitas.....	687
11.4 Perbandingan Efektivitas Di Masing-Masing Kasus.....	691
11.4.1 Konteks Program.....	693
11.4.2 Karakteristik Peserta.....	699
11.4.3 Karakteristik Program.....	704
11.4.5 Hasil.....	710
11.5 Diskusi.....	713
 BAB XII KESIMPULAN.....	 749

BAB XIII SARAN.....	757
13.1 Saran Teoritis.....	757
13.2 Saran Praktis.....	758
13.3 Saran Penelitian Lebih Lanjut.....	762
13.4 Kontribusi.....	763
13.5 Keterbatasan.....	765

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Konten Program PPK	39
3.1 Dimensi Model Evaluasi	68
3.2 Indikator Pengukuran Model Evaluasi PPK	89
4.1 Fokus Penelitian	95
5.1 Pilihan Pendekatan Sesuai dengan Pertanyaan Penelitian	142
5.2 Daftar Nara Sumber	149
5.3 Kategori Kode Konfirmasi.....	152
5.4 Pertanyaan Untuk Masing-Masing Indikator Pengukuran	153
5.5 Daftar Peserta Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Di Kawasan Solo Raya	159
5.6 Fokus Penelitian dengan Indikator Pengukuran.....	163
6.1 Hasil Uji Kelayakan Model Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Di Kawasan Solo Raya.....	185
7.1 Jumlah yang Membutuhkan Domain Pelatihan Kewiraswastaan Di Klaster Perdagangan.....	195
7.2 Indikator Pengukuran Untuk Klaster Perdagangan.....	196
7.3 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Konteks Program Di Klaster Perdagangan.....	218
7.4 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Peserta Di Kalaster Perdagangan.....	236
7.5 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Program Di Klaster Perdagangan.....	277
7.6 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Hasil Di Klaster Perdagangan.....	316
7.7 Pentapatan Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Klaster Perdagangan.....	319
8.1 Jumlah yang Membutuhkan Domain Pelatihan Kewiraswastaan Di Klaster Susu.....	332
8.2 Indikator Pengukuran Untuk Klaster Susu.....	334
8.3 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Konteks Program Di Klaster Susu.....	353
8.4 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Peserta Di Klaster Susu.....	372
8.5 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Program Di Klaster Susu.....	417
8.6 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Hasil Di Klaster Susu.....	456
8.7 Pentapatan Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Klaster Susu.....	459
9.1 Jumlah yang Membutuhkan Domain Pelatihan Kewiraswastaan Di Klaster Batik.....	469
9.2 Indikator Pengukuran Untuk Klaster Batik.....	472
9.3 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Konteks Program Di Klaster Batik.....	488
9.4 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Peserta Di Klaster Susu.....	506

9.5 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Program Di Klaster Susu.....	546
9.6 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Hasil Di Klaster Batik.....	583
9.7 Pentapatan Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Klaster Susu.....	586
10.1 Jumlah yang Membutuhkan Domain Pelatihan Kewiraswastaan Di Klaster Mebel.....	596
10.2 Indikator Pengukuran Untuk Klaster Batik.....	597
10.3 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Konteks Program Di Klaster Batik.....	606
10.4 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Peserta Di Klaster Susu.....	615
10.5 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Karakteristik Program Di Klaster Susu.....	642
10.6 Hasil Konfirmasi Indikator Pengukuran Dimensi Hasil Di Klaster Batik.....	674
10.7 Pentapatan Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Klaster Susu.....	676
11.1 Perbandingan Indikator Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE Di Masing-Masing Kasus.....	692
11.2 Perbandingan Konfirmasi Nara Sumber Di Masing-Masing Kasus.....	696

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Klasifikasi Pendidikandan Pelatihan Kewiraswastaan	38
3.1 Pembentuk Hasil Pelatihan Kewiraswastaan	72
4.1 Model Konseptual Evaluasi Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE	107
4.2 Kerangka Teoritis Model Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE	125
5.1 Teknik Analisis Data	162

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH/SIMBOL

ATM: Anjungan Tunai Mandiri
Bappeda: Badan Perencana Pembangunan Daerah
Bappenas: Badan Perencana Pembangunan Nasional
BCR: Benefit Cost Ratio
BI: Bank Indonesia
BPM: Badan Penanaman Modal
BRI: Bank Rakyat Indonesia
BUMN: Badan Usaha Milik Negara
CEFE: Competency based Economies throughn Formation of Enterprise
CIPP: Context, Input, Process, and Product
CSR: Corporat Social Responsibility
DDFET: Dutch Dairy Farmers Entrepreneurship Training
DED: Deutscher Entwicklungsdienst
EE: Entrepreneurship Education
EPWP: Expanded Public Works Program
ET: Entrepreneurship Training
FEDEP: Forum for Economic Development Promotion
FPESD: Forum Pengambangan Ekonomi dan Sumber Daya
GEM: Global Entrepreneurship Monitor
GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GKBI: Gabungan Koperasi Batik Indonesia
GKSI: Gabungan Koperasi Susu Indonesia
GNAG: Ghana National Association of Garages
GTZ: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
IF: Indikator Efektivitas
IMF: International Monetary Fund
IMTEE: Integrated Model of Training Evaluation and Effectiveness
KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBI: Kantor Bank Indonesia
KPW: Kecakapan Pribadi Wiraswastawan

KUD: Koperasi Unit Desa
MPKM CEFE: Modul Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE
NRSP: National Rural Support Program
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PAD: Pendapatan Asli Daerah
PDB: Produk Domestik Bruto
PDRB: Produk Domestik Regional Bruto
PKP: Pelatihan Kewirausahaan untuk Praktisi
PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPK: Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
PPL: Petugas Penyuluh Lapangan
RED: Regional Economic Development
ROI: Return on Investment
SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat
TAS: the trauma and self injury training
TOT: *Training Of Trainer*)
UMKM: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WEP: Women Entrepreneurship Programme

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Program Evaluation Standard
- Lampiran 2 *Questioner* Untuk Uji Kelayakan Model
- Lampiran 3 *Questioner* Kebutuhan Domain Pelatihan Kewiraswastaan
- Lampiran 4 Modul Pelatihan Kewiraswastaan Metode CEFE
- Lampiran 5 Modul Pelatihan Kewiraswastaan Menggunakan Tangga CEFE
- Lampiran 6 *Questioner* Kebutuhan Domain dan Indikator Pengukuran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewiraswastaan^{1,2} (*entrepreneurship*) tengah menjadi fokus pembicaraan maupun pengambilan kebijaksanaan. Di berbagai negara banyak inisiatif mewacanakan maupun melahirkan wiraswastawan (*entrepreneur*). Fenomena ini muncul setelah pemerintah sulit diandalkan sebagai penyedia lapangan kerja, akibat seringnya terjadi krisis ekonomi (Brock & Evans, 1989; Acs, 1992; Carree & Thurik, 2003; Volkmann et al, 2009; ILO, 2011; Bandiera et al, 2012), termasuk yang disebabkan Pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan keuangan pemerintah dan juga perhatian kebijaksanaan tersedot untuk mengatasi masalah tersebut (Brock & Evans, 1989; Acs, 1992; Carree & Thurik, 2003; Volkmann et al, 2009; ILO, 2011; Bandiera et al, 2012).

Masyarakat harus memecahkan sendiri masalah ketersediaan lapangan kerja itu, baik dengan menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tapi ini memerlukan mental yang tangguh dan ketrampilan tertentu. Salah satu asumsi yang dipercaya bisa memberikan dua hal tersebut adalah pendidikan dan pelatihan kewiraswastaan (PPK/Entrepreneur Education and Training/EET). Birch (1979), misalnya menyatakan, kewiraswastaan menjadi pendorong penting penciptaan lapangan kerja. Pernyataan ini didukung Fritsch (2004), Acs & Armington (2006) dan Schramm & Litan (2009). Hermes & Lensink (2007) dan Karlan & Valdivia (2011) menemukan fakta, kewiraswastaan merupakan sarana stabilitas

¹ Istilah resmi yang dipakai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, untuk menerjemahkan *entrepreneurship* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>), n perihal wiraswasta

² Istilah ini menyakup juga wiraswastawati

dan meningkatkan pendapatan penduduk (World Bank, 2012a) dan perusahaan kecil³ yang banyak menyerap tenaga kerja (Gindling & Newhouse, 2012). Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan kegiatan kewiraswastaan dengan inovasi dan perubahan teknologi (Acs & Varga, 2005; van Praag & Versloot, 2007).

Dengan demikian, secara mikro keberadaan kewiraswastaan dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi pribadi dan keluarga. Sedang secara makro, dapat memainkan peran sebagai katalisator untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial (United Nation Conference on Trade and Development, 2005). Global Entrepreneurship Monitor (GEM)⁴ melaporkan, tidak ada negara dengan tingkat kewiraswastaan tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi rendah (Reynolds et al, 2002: 7, 24; Nickell, 1996); Nickel et al, 1997; Caree & Thurik, 1998: 144; Thurik & Wennekers, 2001: 3; Frijis et al, 2002: 11).

Intervensi promosi kewiraswastaan dalam bentuk PPK telah menjadi skenario umum di hampir semua negara (Garavan & O'Conneide (1994), baik melalui dunia akademis (Gottlieb & Ross, 1997; Charney & Libecap, 2003; Onstenk, 2003), maupun pelatihan kewiraswastaan (PK) untuk praktisi (Garavan & O'Conneide, 1994b; Henry et al, 2005).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan program RED (Regional Economic Development), juga menjalankan scenario ini dengan memberi pelatihan kewiraswastaan kepada wiraswastawan di empat kluster di Solo Raya⁵, menggunakan Metode CEFE (The Competency Based Economies through Formation of Entrepreneurs). CEFE adalah metode PK yang dikembangkan tahun 1983 oleh Badan Kerjasama Internasional Jerman

³ Dikenal sebagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

⁴ Salah satu sumber terpenting dari analisis statistik mengenai kaitan antara kegiatan kewiraswastaan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, studi di negara-negara OECD mengungkapkan adanya hubungan positif antara bisnis rintisan (*start up*) dengan pertumbuhan ekonomi antara tahun 1988-1996 dan 1989-1999 (Kantis et al. 2002: 1).

⁵ Meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karang Anyar

(GIZ/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). PK Metode CEFE memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan para praktisi kewiraswastaan. PK Metode CEFE menempati peringkat keempat paling banyak digunakan di dunia.

Masalahnya, apakah intervensi PK, termasuk PPK Metode CEFE, selalu berjalan sesuai skenario menjadi solusi secara mikro dan menjadi katalis secara makro? Pertanyaan ini mudah dijawab dengan melihat hasil evaluasi PPK. Justru dari sinilah lahir fenomena menarik secara teoritis dan empiris yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

Dari fenomena teoritis ada tiga, *pertama*, didapati data masih sedikitnya penelitian pada evaluasi PPK (Dladla & Mutambara, 2018; Engholm, 2016; McKenzie & Woodruff, 2013; Hutchins et al, 2010; Pittaway, 2009; Henry et al, 2005; Henry et al, 2003; Storey, 2000). Penyebabnya ada tiga, *pertama*, berkaitan dengan sulitnya melakukan penelitian evaluasi (Curran et al, 1999; Turok, 1997), diantaranya beragamnya metodologi⁶ evaluasi (Galvão et al, 2019; Fayolle & Gailly, 2015; Balthasar, 2011). Stufflebeam & Shinkfield (2007) dan House, 1987), misalnya, mencatat tak kurang dari 26 model evaluasi. Banyaknya model itu menyulitkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang bisa diterima secara luas. Coleman (1975) meyebutnya sebagai ketiadaan metode yang konprehensif, sehingga mengurangi minat melakukan penelitian. Sebaliknya, banyaknya model itu juga membuka peluang menciptakan model baru, bagi peneliti. *Kedua*, belum ada konsensus hasil yang diukur dan bagaimana mengukurnya (Petra, 2015; Ho, 2015; Strengthening Nonprofits, 2014; Miller, 2014; OECD, 2009). Learning and Development Roundtable (2009) mengakui kegagalan dalam mendapatkan indikator pengukuran evaluasi. *Ketiga*, kinerja kewiraswastaan (profit, penjualan, dan aset), sulit diukur dengan metode survei kuantitatif (De Mel, 2009). Para responden biasanya sulit menyampaikan kinerja usahanya di *questioner*, dan yang paling banyak terjadi responden tidak memiliki catatan keuangan.

⁶ Untuk menghindari kerancuan dengan metode pelatihan, penelitian ini menggunakan istilah model

Fenomena *kedua*, model evaluasi sebelumnya banyak berbasis kebutuhan pengambil kebijakan dan penyelenggara (Aziz et al, 2018; Utakrit & Siripanich, 2018; Mirzanti et al, 2017). Sedang fenomena *ketiga*, penelitian evaluasi pelatihan kewiraswastaan fokus pada dampaknya pada hasil dan pertumbuhan ekonomi, jarang yang mempermasalahkan bagaimana mekanisme dampak itu terjadi (Amorós & Bosma, 2014)

Dari fenomena empiris juga ada tiga, *pertama*, banyak PPK tidak dievaluasi (da Costa, 2018; Gielnik et al, 2015; Cho & Honorati, 2013; Martin et al, 2013; Coleman & Robb, 2012; Martinez et al, 2010). PPK tidak divalusi karena mahal, memakan waktu, secara teknik kompleks, bisa menjadi masalah politik (Baker, 2000), dan kurangnya keinginan mengimplementasikan rekomendasi (Hytti et al, 2004). Byrne & Fayolle (2009) menyebut evaluasi program PPK sering dikritik hanya untuk mengoleksi lembaran senyum dari para peserta yang sebenarnya berlawanan dengan hasil konkret dari hasil program.

Fenomena empiris *kedua*, pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE menempati peringkat keempat paling banyak digunakan di berbagai negara (Loreto et al, 2019; Peters, 2015; Boukamcha, 2015; McKenzie & Woodruff, 2014). Fenomena empiris *ketiga*, merupakan yang paling urgen, yaitu pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE di Indonesia belum pernah di evaluasi, akan direplikasi ke klaster lain di berbagai kota, dan mendapat dukungan dari lembaga keuangan Bank Indoensia (BI) dan Bank Rakyat Indonesia BRI.

Dari fenomena teoritis dan empiris itu, didapat informasi bahwa penelitian tentang evaluasi pelatihan kewiraswastaan masih sedikit. Penelitian yang masih sedikit itu masih dilengkapi dengan permasalahan metode yang beragam dan belum adanya kesepakatan indikator plengukuran keberhasilan pelatihan. Sementara itu kinerja kewiraswastaan yang mudah diukur yang mengundang banyak penelitian kuantitatif, belum berhasil memberikah kesimpulan konkrit. Infromasi menarik lainnya adalah evaluasi dilakukan lebih banyak berbasis kebutuhan pengambil kebijakan. Selanjutnya informasi yang paling penting, pelatihhan kewiraswastaan

Metode CEFE di Indonesia belum pernah dievaluasi, apakah memberikan hasil nyata berupa kinerja usaha, padahal pelatihan itu akan direplikasi.

Informasi itulah yang memotivasi lahirnya penelitian disertasi ini, *pertama*, ingin menambah riset kualitatif evaluasi pelatihan kewiraswastaan, sebagai jawaban atas masih sedikitnya penelitian tentang evaluasi pelatihan kewiraswastaan, dan menyeimbangkan dengan penelitian kuantitatif yang belum berhasil menggali hasil nyata kinerja kewiraswastaan. *Kedua*, beragamnya model evaluasi dan seringnya evaluasi berbasis kebutuhan pengambil kebijakan, membuka celah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan model evaluasi pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE berbasis kebutuhan peserta pelatihan.

Ketiga, belum adanya kesepakatan indikator pengukuran keberhasilan pelatihan, bisa dimanfaatkan untuk menciptakan indikator pengukuran keberhasilan bagi pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE. *Keempat*, banyaknya penelitian evaluasi yang fokus pada hasil, membuka kesempatan untuk menemukan bagaimana mekanisme pelatihan berdampak pada hasil. *Kelima*, belum dievaluasinya pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE di Indonesia, akan menjadi kontribusi nyata warga negara jika berhasil melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Apalagi pelatihan tersebut akan dilakukan di banyak kota di Indonesia, tentu perlu dibuktikan dulu efektivitasnya.

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah, *pertama*, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara alami, metode studi kasus ini akan membawa perbedaan dengan penelitian lain, karena kecil kemungkinan kasus akan sama. *Kedua*, melibatkan semua pemangku kepentingan. Penelitian sebelumnya kebanyakan hanya melibatkan peserta pelatihan, karena sebagian besar evaluasi pelatihan kewiraswastaan adalah mengukur perubahan yang terjadi pada peserta dan usahanya. *Ketiga*, sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada hasil, pada penelitian ini selain hasil juga akan menggali informasi bagaimana hasil itu tercapai. *Keempat*, beragamnya model evaluasi pelatihan kewiraswastaan

telah membuka kesempatan menciptakan model evaluasi khusus untuk pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE, model khusus ini secara alami juga akan berbeda dengan model-model evaluasi pelatihan kewiraswastaan sebelumnya. *Kelima*, sama dengan model evaluasi, belum adanya kesepakatan indikator pengukuran keberhasilan, membuat penelitian ini juga menciptakan indikator pengukuran keberhasilan sendiri, yang tentu tidak akan sama dengan indikator pengukuran sebelumnya. *Keenam*, penelitian ini dilakukan dengan dua fase. Pertama fase kuantitatif, yaitu mengukur frekuensi secara statistik. Fase ini digunakan untuk menguji kelayakan model secara ilmiah. Fase kedua, penelitian kualitatif, dengan wawancara mendalam para nara sumber. Fase ini untuk mencari jawaban hasil kinerja kewiraswastaan dan bagaimana kinerja tersebut tercapai. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menggunakan satu fase. *Ketujuh*, indikator pengukuran keberhasilan penelitian ini adalah efektivitas pelatihan, sedangkan penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan indikator pengukuran hasil kinerja kewiraswastaan. *Kedelapan*, penelitian sebelumnya sebagian besar berbasis kebutuhan pengambil kebijakan, sedangkan penelitian ini berbasis kebutuhan peserta pelatihan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penyajian latar belakang di atas, jelas bahwa intervensi pada promosi kewiraswastaan dalam bentuk program PPK menempati posisi penting, kalau bukan mendapatkan perhatian terbesar dari berbagai kalangan. Sayangnya, berbagai metode PPK belum ada hasil evaluasi yang kokoh (*rigor*). Kondisi ini meninggalkan *gap* informasi tentang hasil dari intervensi berupa program PPK tersebut, khususnya dalam hal apakah hasil intervensi itu bekerja dengan baik atau tidak, yaitu memberikan hasil sesuai yang diinginkan, sehingga metode pelatihan tersebut layak dipilih?

Di sisi lain, konfirmasi dari peserta bisa menimbulkan bias bagi keberhasilan metode yang digunakan. Oleh karena itu konfirmasi harus dilakukan secara hati-hati, sehingga bisa membuktikan bahwa para peserta PPK benar-benar mendapatkan manfaatnya. Masalahnya

bagaimana cara mendapatkan bukti manfaat tersebut? Disinilah letak pentingnya evaluasi atas metode pelatihan.

Yang lebih penting, walaupun sebuah evaluasi terhadap metode pelatihan kewiraswastaan menunjukkan bahwa metode tersebut memberi hasil yang baik, bagaimana komponen evaluasi itu membentuk hasil yang baik tersebut? Terutama memperhatikan temuan Coleman (1975), bahwa belum ada metode PPK yang komprehensif, dan temuan OECD (2009) soal belum ada konsensus atas metode definitif untuk pengukuran hasil yang mana yang harus diukur dan bagaimana mengukurnya?

Karena itu, permasalahan besar yang ingin dijawab secara teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE?
2. Apakah model itu layak: baik secara metodologi, relevan secara praktik, dan transparan secara proses?
3. Bagaimana dimensi membentuk efektivitas pelatihan kewiraswastaan metode CEFE?
4. Bagaimana menciptakan indikator efektivitas pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE
5. Bagaimana menetapkan pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE sebagai efektif?

Selain menjawab permasalahan teoritis diatas, penelitian juga ingin menjawab permasalahan praktis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hasil pelatihan Metode CEFE efektif?
 - 1.1. Dari sisi konteks program, apakah pemerintah mendukung?
 - 1.2. Dari sisi peserta, apakah peserta bersedia mendaftar secara sukarela

1.3. Dari sisi karakteristik program, apakah konten dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kemas pelayanan diberikan?

1.4. Dari sisi hasil, apakah kinerja kewiraswastaan meningkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti telah dikupas di bagian latar belakang, bahwa kewiraswastaan saat ini memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai katalisator pengangguran dan kemiskinan. Bagi Indonesia, posisi itu menjadi lebih penting lagi, mengingat masalah pengangguran dan kemiskinan belum bisa diatasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga lain amat berkepentingan dengan program-program kewiraswastaan, terutama program pelatihan kewiraswastaan. Untuk merealisasikan kepentingan itu, Bappenas dan GTZ bekerja sama menentukan dan menyelenggarakan pelatihan kewiraswastaan dengan memilih Metode CEFE sebagai sarana pelatihannya. Namun, seperti juga disampaikan dalam latar belakang bahwa banyak pelatihan dijalankan namun masih sedikit yang melakukan evaluasi atas program pelatihan tersebut, termasuk pelatihan kewiraswastaan dengan Metode CEFE yang dipilih Bappenas. Secara praktis, sedikitnya evaluasi tersebut berkaitan dengan keengganan melakukan evaluasi terhadap program PPK, karena kegiatan evaluasi itu dirasa mahal, memakan waktu dan secara teknik kompleks. Yang lebih menyulitkan, temuan yang diperoleh bisa menjadi masalah politik yang kompleks juga. Sedangkan secara teoritis, kesulitan melakukan evaluasi berkaitan dengan metodologi, yaitu belum ada metodologi yang komprehensif dan mendapatkan konsensus tentang apa yang akan diukur dan bagaimana mengukurnya.

Karena itu, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menemukan model evaluasi metode pelatihan kewiraswastaan untuk praktisi, khususnya pelatihan yang menggunakan metode CEFE. Tujuan lain yang juga penting adalah mencari tahu bagaimana dimensi-dimensi yang ada dipelajari kewiraswastaan membentuk hasil pelatihan. Tujuan berikutnya, menemukan

komponen apa yang menjadi tolok ukur dan bagaimana mengukur hasil pelatihan kewiraswastaan.

Dengan ditemukan model evaluasi itu diharapkan mendapat instrumen untuk mengukur keberhasilan pelatihan kewiraswastaan metode CEFE. Sehingga dapatlah diketahui hasil dari pelatihan kewiraswastaan yang cukup bermanfaat tersebut. Seandainya hasil evaluasi itu menunjukkan hasil yang baik, tentu akan membawa dampak yang besar, yaitu pelatihan bisa dilanjutkan ketempat lain, dan ketersediaan wiraswastawan semakin banyak. Kondisi ini bisa diharapkan untuk memberikan kemaslahatan yang baik, yaitu berpotensi menciptakan kesempatan kerja, sehingga akan membantu memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, seperti telah disajikan sebelumnya, penelitian untuk kepentingan disertasi ini juga memiliki kegunaan. Kegunaan tersebut tidak tunggal, dalam arti selain penelitian memiliki beberapa kegunaan secara fungsional masing-masing, kegunaan tersebut juga bisa digolongkan dalam beberapa jenis, yang akan dibahas masing-masing. Untuk kepraktisan, pembahasan mengenai kegunaan penelitian ini berdasarkan penggolongan atau kelompok saja, dan tidak akan rincinya hingga kegunaan fungsional.

Tentulah akan memiliki arti dan memberikan sumbangan jika suatu penelitian mampu melahirkan kegunaan. Karena dengan kegunaan itu, penelitian tidak saja hanya berhenti sebagai bahan rujukan penulisan ilmiah, seperti layaknya penelitian ilmiah yang selama ini terjadi, namun mampu memberikan kontribusi berupa solusi bagi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kegunaan penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu, kegunaan teoritis, kegunaan praktis, dan kegunaan kebijakan.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Seperti penelitian ilmiah lainnya, penelitian ini juga menjalankan tradisi memberikan kegunaan teoritis, yang akan memberikan kesempatan bagi peneliti yang lain untuk memanfaatkannya sebagai referensi. Adapun kegunaan teoritis yang diberikan oleh penelitian ini adalah memberikan referensi menemukan model evaluasi efektivitas program PPK, terutama untuk pelatihan kewiraswastaan yang pesertanya adalah para praktisi kewiraswastaan atau wiraswastawan.

Dalam pengajaran kewiraswastaan dibedakan antara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan kewiraswastaan diberikan kepada pelajar dan mahasiswa di sekolah-sekolah, sedang pelatihan kewiraswastaan bisa diberikan kepada siapa saja, baik pelajar, praktisi kewiraswastaan, pencari kerja, maupun kalangan pemerintah dan lembaga swasta. Dari luasnya pengajaran kewiraswastaan itu, tentu akan luas pula metode dan tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas program PPK tersebut (Bab III mengupas masalah ini).

Karena fokus evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini hanyalah pada pelatihan kewiraswastaan bagi praktisi, maka hasil kajian teoritis hanya menemukan model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan untuk praktisi. Kemudian temuan ini menjadi kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis ini diharapkan bisa menjadi bahan penelitian ataupun kajian lebih lanjut, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain mengusulkan model evaluasi yang bisa menjadi referensi bagi penemuan model-model evaluasi baru, kegunaan teoritis lainnya adalah memberikan informasi tentang dimensi-dimensi yang membentuk hasil pelatihan. Banyak penelitian tentang evaluasi PPK langsung fokus pada hasil pelatihan. Padahal, untuk mengetahui kepastian dan kesahihan hasil pelatihan tersebut, ada baiknya diketahui hal-hal yang membentuk hasil pelatihan tersebut. Dimensi-dimensi ini bisa menjadi bahan kajian teoritis lebih lanjut.

Satu lagi kegunaan teoritis yang bisa dikemukakan adalah menyajikan wacana tentang pengukuran keberhasilan PPK dan bagaimana cara mengukurnya. Penelitian ini akan

menyajikan dan mengaji banyak pengukuran keberhasilan, sehingga harus dipilih sesuai dengan jenis dan ruang lingkup PPK. Pemilihan itu tentu akan menjadi kajian teoritis yang menantang. Demikian pula dengan cara mengukur keberhasilan PPK, penelitian ini menggunakan cara-cara yang bisa berkontribusi bagi pengembangan teori tentang pengukuran keberhasilan PPK.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan kelompok kedua dari penelitian ini adalah kegunaan praktis. Kalau kegunaan teoritis diharapkan bisa menjadi energi bagi pengajian dan referensi teori lebih lanjut di dunia ilmu pengetahuan, maka kegunaan praktis ini diharapkan bisa langsung menjadi alat evaluasi bagi pelatihan kewiraswastaan untuk praktisi. Menggunakan model evaluasi yang ditemukan, penelitian ini akan menyediakan sarana evaluasi bagi pelatihan kewiraswastaan untuk praktisi dimaksud. Dengan menggunakan model evaluasi yang ditemukan, penelitian ini sudah bisa menentukan apakah pelatihan kewiraswastaan dengan menggunakan Metode CEFE memberikan hasil yang baik kepada para pesertanya, juga menentukan apakah konten dan kurikulum pelatihan mendukung hasil yang baik itu.

Lebih lanjut, model evaluasi yang ditemukan tidak terbatas hanya untuk mengevaluasi program pelatihan kewiraswastaan dengan Metode CEFE. Ada kemungkinan model ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi metode-metode pelatihan kewiraswastaan lainnya, yang mirip dengan Metode CEFE. Inilah kegunaan praktis yang bisa disumbangkan penelitian ini.

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Seperti diketahui, dan banyak dikaji secara teoritis maupun dipraktikkan secara empiris, ketrampilan kewiraswastaan memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi, tertutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah maupun lembaga pendidikan memberikan perhatian serius terhadap akuisisi ketrampilan

kewiraswastaan ini. Satu-satunya jalan untuk melakukan akuisisi ketrampilan kewiraswastaan ini adalah memberikan intervensi berupa pendidikan dan pelatihan kewiraswastaan.

Persoalannya adalah apakah intervensi itu mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan? Disinilah diperlukan intervensi lain berupa evaluasi program PPK. Masalahnya adalah bagaimana melakukan evaluasi program PPK itu? Persoalan muncul mulai dari masalah integritas (kerelalan untuk dievaluasi), administrasi (menyangkut biaya dan waktu), hingga cara melakukan evaluasi.

Penelitian ini hadir untuk menjawab permasalahan cara mengevaluasi saja, yaitu dengan mengusulkan model evaluasi atas efektivitas metode pelatihan. Dengan diperolehnya cara mengevaluasi melalui model yang ditemukan, maka pihak yang berkepentingan dengan hasil evaluasi dapat membuat kebijakan atas program PPK. Misalnya, diketahui dari hasil evaluasi menggunakan model yang ditemukan itu menunjukkan hasil yang baik, maka pengambil kebijakan bisa mengambil kebijakan lanjutan, seperti mereplikasi program PPK di tempat lain. Sehingga akan lebih banyak orang yang bisa menikmati program PPK tersebut. Sebaliknya, seandainya hasil evaluasi menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, maka pengambil kebijakan bisa mengambil keputusan untuk membuat kebijakan menghentikan program PPK atau menggantinya dengan program PPK dengan metode yang lain.

1.5. Sistematikan Penulisan

Disertasi ini akan terdiri dari sebelas bab, yang dimulai dari Bab I Pendahuluan dan diakhiri dengan Bab XI Saran-saran. Bab-bab tersebut disusun secara berurutan, yang tidak bisa ditukar tempat masing-masing babnya. Ini karena memang cara kerja penyusunan disertasi ini sudah diatur sesuai dengan urutan pembahasan topik bab. Meskipun sebenarnya penulisan disertasi ini mengikuti kaidah yang bebas. Berikut disajikan uraian rencana isi masing-masing bab:

1.5.1. Bab I Pendahuluan

Bab pertama ini merupakan awal dari penulisan disertasi. Di bab ini akan dibahas latar belakang masalah, yang merupakan alasan mengapa topik tentang penemuan model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan dengan metode CEFE diangkat menjadi masalah penelitian untuk menyusun disertasi? Selain menyajikan latar belakang masalah dan motivasi yang mendasarinya, di bab I ini juga ditampilkan rumusan masalah, yang akan dijawab dalam kesimpulan diakhir disertasi. Kemudian disusul dengan penyajian tentang tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sebelum diakhiri dengan sistematika penulisan.

1.5.2. Bab II Tinjauan Pustaka

Di bab ini disajikan kajian teori dan temuan-temuan penelitian terdahulu untuk mengantarkan, mendasari dan memperjelas alur pikir dan alur analisis dalam menyelesaikan masalah penelitian. Di bagian tinjauan pustaka ini, akan dibahas lima tema besar yang relevan, yaitu definisi kewiraswastaan, peran kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi, pelatihan kewiraswastaan, efektivitas pelatihan kewiraswastaan, dan model efektivitas pelatihan kewiraswastaan.

Tema pertama, definisi kewiraswastaan, disajikan karena membicarakan efektivitas pelatihan kewiraswastaan tentu tidak akan sampai pada kesimpulan yang benar kalau tidak dipahami lebih dulu apa itu kewiraswastaan. Selanjutnya, peran kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi dibahas, dimaksudkan sebagai landasan penguat alasan mengapa topik tentang kewiraswastaan maupun evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan penting untuk diangkat sebagai materi penelitian?

Pelatihan kewiraswastaan, merupakan tema yang akan mengantarkan pada pembahasan utama dari penelitian ini, yaitu mengenai evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan. Oleh karena itu, tentu diperlukan pemahaman dan analisis mengenai pelatihan kewiraswastaan ini. Terakhir, model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan dibahas, karena memang hal inilah

yang diteliti, yaitu menemukan instrumen yang sahih untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE.

1.5.3. Bab III Proses Evaluasi Efektivitas Metode Pelatihan Kewiraswastaan

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana pelatihan kewiraswastaan memberikan hasil yang diinginkan. Di sini diperdebatkan mulai dari metode untuk mengetahuinya (model evaluasi), unsur yang dievaluasi, hingga materi pelatihan dari sebuah metode pelatihan.

Selain mengetahui keberhasilan pelatihan, sebenarnya ada lagi satu masalah yang cukup penting untuk diperhatikan. Masalah itu adalah, cukup banyak penyelenggaraan PPK tidak dievaluasi, terutama pelatihan yang diselenggarakan pemerintah yang berorientasi proyek. Secara lengkap topik-topik yang dibahas di bab ini adalah pengukuran hasil pelatihan kewiraswastaan, pengukuran karakteristik program pelatihan kewiraswastaan, pengukuran konteks pelatihan kewiraswastaan, dan pengukuran karakteristik peserta pelatihan kewiraswastaan.

1.5.4. BAB IV Model Analisis

Bab ini merupakan tindak lanjut dari bab III. Kalau di Bab III disajikan semua pengukuran efektivitas pelatihan kewiraswastaan, maka di Bab IV mulai fokus pada pembahasan mengenai pengukuran efektivitas pelatihan kewiraswastaan untuk kalangan praktisi kewiraswastaan, yang merupakan subyek dari penelitian ini. Di bab ini mulai disajikan juga model yang dipilih untuk membuat analisis efektivitas pelatihan kewiraswastaan dengan Metode CEFE.

Ada tiga tema besar yang dibahas di Bab IV ini, yaitu model penelitian, hubungan antar dimensi, dan kerangka pemikiran.

1.5.5. BAB V Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Sebab pada bagian inilah sebuah hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan, yaitu berdasar kaidah yang sudah disepakati, atau paling tidak bisa dilakukan penelusuran mengenai alur dan cara-cara yang dilakukan selama proses penelitian, sehingga bisa didapat hasil seperti yang diinginkan.

Untuk memenuhi tuntutan di atas itulah, Bab V ini ditulis. Bagian ini akan menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Karena setiap penelitian memiliki metodenya sendiri, sesuai dengan jenis dan topik yang diteliti, maka metode penelitian yang disajikan dibagian ini hanya terbatas pada metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi desain dan pendekatan penelitian, pemilihan kasus, unit analisis, teknik pengumpulan data, kasus, reliabilitas, dan validitas.

Bab VI Kelayakan Model

Bab ini akan menyajikan bahasan tentang kualitas model yang diciptakan. Di bab ini akan kemukakan hasil tes statistik berupa nilai rata-rata dan standar deviasi atas tanggapan para responden para peserta pelatihan terhadap model yang dihasilkan. Dari bab ini akan diketahui seberapa tinggi kualitas model yang dibuat. Adapun standar yang digunakan untuk membuat *questioner* adalah diambil dari standar evaluasi program yang dibuat oleh Joint Committee Program Evaluation Standards. Pengujian kualitas model dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi, agar bisa digunakan untuk melakukan evaluasi secara praktik.

Bab VII Kasus 1: Klaster Perdagangan

Bab ini akan diisi dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas pelatihan kewirawastaan Metode CEFE di Klaster Perdagangan. Klaster ini adalah satu-satunya klaster yang bukan produsen. Klaster ini berlokasi di Kota Surakarta bagian Selatan.

Klaster ini akan memberikan konfirmasinya terhadap semua indikator pengukuran yang ada di dimensi sehingga akan diketahui efektivitas pelatihan kewirastaan Metode CEFE di Klaster Perdagangan.

Konfirmasi dimulai dari dimensi konteks program, kemudian di susul dimensi karakteristik peserta, dimensi karakteristik program, dan diakhiri dengan konfirmasi di dimensi hasil. Konfirmasi dilakukan dengan wawancara mendalam kemudian hasilnya dituangkan dalam hasil konfirmasi yang digunakan sebagai indikator efektivitas. Indikator efektivitas ini digunakan sebagai alat untuk menetapkan efektivitas pelatihan. Bab ini dimulai dengan penyajian hasil survei kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan indikator pengukuran, indikator efektivitas, penetapan efektivitas, dan diakhiri dengan kesimpulan dan analisis.

BAB VIII Kasus 2: Klaster Susu

Bab ini diisi dengan hasil pengumpulan data dan pembahasan efektivitas pelatihan Metode CEFE di Klaster Susu. Klaster susu berlokasi di Kabupaten Boyolali, dimana para peserta pelatihan adalah para peternak sapi perah. Sama dengan di Klaster Perdagangan, penyajian materi di bab ini didahului dengan pendahuluan, kemudian diikuti penyajian hasil survei kebutuhan domain, dilanjutkan dengan penentuan indikator pengukuran, indikator efektivitas, penetapan efektivitas, dan diakhiri dengan kesimpulan dan analisis di klaster susu ini.

Bagian terbanyak dari penyajian bahasan di klaster susu adalah konfirmasi terhadap indikator pengukuran. Konfirmasi ini dilakukan terhadap semua dimensi. Dimulai dari dimensi konteks program, yang pada intinya menggali konfirmasi peserta atas keberadaan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Kemudian untuk dimensi karakteristik peserta, para nara sumber dikonfirmasi dengan motivasi peserta untuk mengikuti pelatihan, apakah peserta memiliki antusiasme tinggi mengikuti proses pelatihan, yang salah satu indikatornya adalah mendaftar dengan suka rela. Dilanjutkan dengan dimensi karakteristik program. Di dimensi ini peserta dikonfirmasi keberadaan konten dan kurikulum pelatihan kewiraswastaan dan diajarkannya

konten dan kurikulum tersebut. Untuk dimensi hasil peserta dikonfirmasi dengan hasil nyata yang dirasakan, setelah para peserta mengikuti pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE.

Bab IX Kasus 3: Klaster Batik

Bab IX berisi pembahasan hasil evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE di klaster batik. Pembahasan dimulai dengan pendahuluan yang berisi alasan mengapa bab ini perlu ditulis. Kemudian diikuti dengan menyajikan hasil survei kebutuhan domain di klaster batik. Di sini disajikan domain apa saja yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan di klaster ini. Setelah itu dilanjutkan dengan penyajian indikator pengukuran yang dibutuhkan. Sama dengan kebutuhan domain, kebutuhan indikator pengukuran juga menyampaikan indikator pengukuran apa saja yang dibutuhkan klaster batik ini. Bahasan berikutnya menyajikan indikator efektivitas. Bagian ini berisi konfirmasi atas indikator pengukuran masing-masing domain yang digunakan untuk mendapatkan indikator efektivitas. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan penetapan efektivitas. Bagian ini merupakan bagian yang menentukan apakah pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE berjalan efektif di klaster batik. Bab IX diakhiri dengan penyajian kesimpulan dan analisis. Bagian ini menyajikan hal-hal penting yang diperoleh dari pembahasan penetapan efektivitas.

Klaster batik berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, yang menempati dua kecamatan, yaitu Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban. Keberadaan industri batik di dua kecamatan itu seperti anomali, karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Sukoharjo berprofesi sebagai petani. Keberangkatan para perajin batik memang bukan direncanakan, melainkan pekerjaan sampingan para wanita mantan pembatik. Meskipun demikian, para peserta pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE di klaster batik ini, cukup antusias mengikuti pelatihan.

Bab X Kasus 4: Klaster Mebel

Bab X berisi pembahasan hasil evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE di klaster mebel. Pembahasan dimulai dengan pendahuluan yang membahas alasan bab ini perlu ditulis. Kemudian diikuti dengan menyajikan hasil survei kebutuhan domain di klaster mebel. Di sini disajikan domain apa saja yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan di klaster ini. Setelah itu dilanjutkan dengan penyajian indikator pengukuran yang dibutuhkan. Kebutuhan indikator pengukuran juga menyampaikan indikator pengukuran apa saja yang dibutuhkan klaster mebel ini. Berikutnya pembahasan menyajikan indikator efektivitas. Bagian ini menyampaikan konfirmasi atas indikator pengukuran masing-masing domain yang digunakan untuk mendapatkan indikator efektivitas. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan penetapan efektivitas. Bagian ini memakan porsi terbesar dari isi Bab X. Bab X diakhiri dengan penyajian kesimpulan dan analisis, yang merupakan hasil akhir dari rangkaian pembahasan seluruh bab.

Klaster mebel berlokasi di desa Trangsam di Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan industri mebel di desa Trangsam juga merupakan anomali, karena semua desa di sekelilingnya penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani. Para peserta pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE di klaster mebel, sangat antusias mengikuti pelatihan, karena pola pikir kewiraswastaan sudah terbentuk seiring dengan keberadaan industri mebel di desa itu.

Bab XI Kesimpulan

Bab ini merupakan yang terpenting dari serangkaian penelitian evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaa Metode CEFE. Karena disinilah akan diketahui apakah pelatihan yang telah dilakukan memiliki manfaat atau tidak atau sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Bab ini merupakan akhir dari serangkaian penyajian semua bab yang sudah disusun secara berurutan, sehingga akan terlihat benang merah mulai dari bagian pendahuluan hingga bagian kesimpulan. Di bab ini akan disajikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sudah diajukan di Bab I. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula disajikan kesimpulan-

kesimpulan lain yang ditemukan selama melakukan pembahasan, sehingga bisa lebih memperkaya hasil dari penelitian ini.

Bab XII Saran

Saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. Oleh karena itu, saran-saran yang akan disajikan di Bab XII ini tidak bisa terlepas dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat di bab sebelumnya. Saran-saran akan terdiri dari saran bagi pengembangan teori, saran majerial, dan saran bagi peneltian lebih lanjut. Saran pengembangan teori berupa saran-saran yang dimaksudkan untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada, sehingga penelitian pada disertasi ini bisa memiliki kontiribusai secara teoritis. Saran manajerial merupakan saran praktis yang bisa ditujukan kepada pemerintah maupun para peserta pelatihan kewiraswastaaan dengan Metode CEFÉ. Diharapkan saran manajerial ini bisa memberi arahan bagi pengembangan pelatihan kewiraswastaaan di Indonesia. Kemudian saran bagi penelitian lebih lanjut ditujukan kepada para pembaca disertasi ini, dimana dengan membaca disertasi mendapatkan inspirasi untuk melakukan penelitian-penelitian lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini adalah tentang model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan. Untuk mengantarkan, mendasari dan memperjelas alur pikir dan alur analisis, kiranya perlu disajikan lebih dulu teori-teori yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Secara teoritis, pastilah akan banyak definisi dan pendapat tentang kewiraswastaan maupun model efektivitas pelatihan kewiraswastaan itu. Perdebatan pastilah juga sudah cukup lama terjadi, dan kajian pun diyakini sudah banyak dilakukan.

Dalam bagian tinjauan pustaka ini, akan dibahas lima tema besar yang relevan, yaitu kewiraswastaan, peran kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi, pelatihan kewiraswastaan, efektivitas pelatihan kewiraswastaan, dan model efektivitas pelatihan kewiraswastaan. Tema pertama, tentang kewiraswastaan, disajikan karena membicarakan efektivitas pelatihan kewiraswastaan tentu tidak akan sampai pada kesimpulan yang benar kalau tidak dipahami lebih dulu apa itu kewiraswastaan. Berangkat dari alasan inilah maka pembahasan tentang tema kewiraswastaan berkisar pada definisi kewiraswastaan, perdebatan diantara definisi hingga sintesa yang mungkin dibuat.

Selanjutnya, Peran kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi dibahas, dimaksudkan sebagai landasan penguat alasan mengapa topik tentang kewiraswastaan maupun evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan penting untuk diangkat sebagai materi penelitian? Seperti diketahui, permasalahan besar yang belum terpecahkan, terutama di negara-negara sedang berkembang—termasuk di Indonesia—adalah pengangguran dan kemiskinan. Solusi utama dari masalah tersebut adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau tugas penyediaan lapangan pekerjaan ini dibebankan kepada pemerintah, dipastikan tidak akan mampu menyelesaikannya. Kesempatan yang masih terbuka lebar adalah bekerjanya kewiraswastaan.

Jika banyak orang mampu berwiraswasta, maka akan terbuka kesempatan kerja, baik untuk wiraswastawan sendiri maupun bagi orang lain. Jika kesempatan kerja banyak tercipta, maka akan berkuranglah kemiskinan. Karena itu amatlah penting peran kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi.

Pelatihan kewiraswastaan, merupakan tema yang akan mengantarkan pada pembahasan utama dari penelitian ini, yaitu mengenai evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan. Oleh karena itu, tentu diperlukan pemahaman dan analisis mengenai pelatihan kewiraswastaan ini.

Terakhir, model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan dibahas, karena memang hal inilah yang diteliti, yaitu menemukan model untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE. Selain itu, sebenarnya tema ini terkait dengan tiga dari tema sebelumnya. Ini berangkat dari pemikiran yang sudah disebutkan di atas, yaitu persoalan utama negara sedang berkembang adalah pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menyediakan lapangan kerja. Untuk bisa menyediakan lapangan kerja, kewiraswastaan menjadi sarana yang paling mungkin disediakan. Bagaimana menyediakan kewiraswastaan itu? Banyak pemerintah memfasilitasi pelatihan kewiraswastaan. Pemerintah Indonesia juga menyediakan fasilitas pelatihan itu, yaitu dengan memilih Metode CEFE. Masalahnya adalah, apakah pelatihan kewiraswastaan dengan Metode CEFE benar-benar berhasil, sehingga bisa melahirkan wiraswastawan atau mengembangkan wiraswastawan yang sudah eksis? Disinilah diperlukan tindakan evaluasi. Namun bagaimana evaluasi itu akan dilakukan agar sah? Jawabannya adalah dengan menemukan model evaluasi yang valid.

Demikianlah bagian ini akan menyajikan lima tema yang relevan, dengan urutan mulai kewiraswastaan, pelatihan kewiraswastaan, peran penting kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi, evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan, dan model evaluasi efektivitas pelatihan kewiraswastaan.

2.1. Definisi Kewiraswastaan

Saat ini lebih dari 1000 publikasi dibidang kewiraswastaan diterbitkan setiap tahun di lebih dari 50 konferensi dan 25 jurnal khusus kewiraswastaan. Dari kuantitas penerbitan itu dapat dibayangkan betapa banyaknya topik yang dibahas, betapa serunya perdebatan yang terjadi, dan betapa hebatnya gagasan, konsep, dan definisi yang dilahirkan. Barangkali hal ini pula yang menyebabkan konsep kewiraswastaan dikenal memiliki kompleksitas dalam tradisi teori ekonomi, sehingga memformulasikan definisi yang pasti dan tunggal adalah pekerjaan yang ekstrim sulit, sehingga siapapun yang mencoba membuat definisi dipastikan tidak mampu menghindar dari sejarah kompleksitas ini. Bygrave & Hofer (1991) sampai pada kesimpulan, para peneliti kewiraswastaan terbentur pada langkanya kerangka konseptual untuk konsep kewiraswastaan yang bisa diterima secara umum. Kelangkaan konsensus dalam arti istilah konsep ini memaksa para peneliti harus membuat pernyataan yang jelas pada apa yang mereka maksudkan, jika mereka menggunakan istilah konsep kewiraswastaan itu.

Sayangnya, di dunia bisnis modern sekarang ini, kewiraswastaan merupakan jantungnya. Kewiraswastaan merupakan tulang punggung bisnis-bisnis inovatif yang menjadi karakteristik ekonomi digital. Sehingga memancing para peneliti maupun praktisi kewiraswastaan mencoba membuat definisi yang spesifik, yang kalau diidentifikasi apa yang mereka sajikan sebenarnya hanya ingin menyatakan bahwa kewiraswastaan berbeda dengan ilmu ekonomi dan pemikiran manajemen. Definisi-definisi itu disajikan dalam bentuk rentang istilah yang luas, mulai dari istilah ketrampilan hingga proses, dari minat hingga perilaku aktual di dunia kewiraswastaan. Bahkan ada kesan perbedaan definisi tersebut seperti hanya menghalangi lahirnya definisi yang universal.

Definisi kewiraswastaan paling awal muncul pada abad 18—meskipun masih sebatas digunakan dalam istilah ekonomi—yang menggambarkan adanya pengambilan risiko. Berikutnya definisi ini diperluas dengan memasukkan konsep faktor produksi dan produksi. Definisi-definisi

itu melahirkan pertanyaan apakah ada fungsi kewiraswastaan yang unik? Atau apakah itu hanya penyederhanaan dari manajemen? Belum terjawab pertanyaan-pertanyaan itu, awal abad 21 definisi kewiraswastaan mulai menambahkan konsep inovasi, seperti inovasi proses, inovasi pasar, inovasi produk, inovasi faktor produksi, bahkan hingga inovasi keorganisasian. Belakangan juga muncul definisi yang menonjolkan kewiraswastaan sebagai penciptaan perusahaan baru (*new venture creation*). Definisi ini berarti menitikberatkan pada kelembagaan kewiraswastaan, padahal membicarakan kewiraswastaan tidak bisa dilepaskan dari wiraswastawannya sendiri. Oleh karena itu, banyak juga definisi yang mulai menitikberatkan peran wiraswastawannya. Karena justru individu wiraswastawan ini yang akan melahirkan atau mewarnai berbagai kewiraswastaan.

Definisi kewiraswastaan semakin meluas dengan hadirnya pandangan-pandangan dari berbagai keilmuan. Setiap sarjana berusaha memasukkan konsep dan pemahamannya sesuai dengan keilmuan masing-masing. Alvarez & Urbano (2011), misalnya, mengidentifikasi tiga teori dalam mendefinisikan kewiraswastaan, yaitu Teori Ekonomi, Psikologi, dan Sosiologi atau Kelembagaan. Bridge & O'Neill (2012) mencatat lebih luas lagi pendekatan yang digunakan, yaitu ada enam pendekatan keilmuan, terdiri dari: Teori Personalitas, Teori Perilaku, Teori Ekonomi, Teori Sosiologi, dan Teori Integrasi. Fillion (1997) mengajukan usulan empat kesarjanaan yang mewarnai definisi kewiraswastaan, yaitu kesarjanaan ekonomi, perilaku, administrasi, kemanusiaan, dan kewiraswastaan sendiri. Dari inisiatif memasukkan pandangan dari berbagai keilmuan itu, akhirnya Quintero et al (2019), berkesimpulan, definisi kewiraswastaan banyak mengadopsi ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi.

Selain mempengaruhi definisi kewiraswastaan menggunakan pendekatan keilmuan, cukup banyak juga yang membuat definisi dengan pendekatan lain. Long (1983), misalnya, setelah mencermati definisi yang dibuat Schumpeterian yang dianggapnya belum detail, mengusulkan definisi yang mengadopsi eksistensi kesuksesan seorang wiraswastawan. Alasannya wiraswastawan pastilah telah menyurahkan energi banyak dan proses yang rumit

untuk mendapatkan sukses. Karena itu definisi kewiraswastaan mestinya memasukkan tiga ciri dengan tingkat variasinya, yaitu ketidakpastian dan risiko, kompetensi manajerial yang lengkap, dan oportunis yang kreatif. Gries & Naudé (2011), mencatat ada definisi kewiraswastaan yang merefleksikan kategorisasi. Paling tidak ada tiga kategori, yaitu kategori perilaku, bidang kerja, dan kategori definisi yang mencoba membuat sintesis dari berbagai definisi.

Gartner (1990) bahkan mencatat delapan tema yang layak dipertimbangkan dalam mendefinisikan kewiraswastaan, yaitu wiraswastawan, inovasi, penciptaan organisasi, penciptaan nilai, motif keuntungan atau non keuntungan, pertumbuhan, keunikan, dan manajer-pemilik. Kelak, Gartner sendiri hanya mengadopsi tema penciptaan organisasi ketika merumuskan definisi resminya. Stevenson & Gumpert (1991) juga menemukan banyak istilah yang telah digunakan untuk mendefinisikan kewiraswastaan, diantaranya keinovatifan, fleksibilitas, dinamis, pengambil risiko, kreativitas, penciptaan nilai, keunikan, dan orientasi tumbuh.

Cunningham & Lischeron (1991), sebenarnya sudah mencoba merangkum semua pendekatan definisi kewiraswastaan yang dipaparkan di atas. Tapi, seperti juga sudah dinyatakan di awal bagian ini, konsep kewiraswastaan dikenal memiliki kompleksitas, maka tetap saja lahir definisi-definisi kewiraswastaan yang terus mencoba memasukkan pandangan masing-masing. Cunningham & Lischeron (1991), mencatat enam kelompok pendekatan definisi kewiraswastaan:

- a. Pendekatan orang besar, yaitu berdasar biografi wiraswastawan sukses
- b. Teori Psikologi, yang memasukkan unsur perilaku wiraswastawan yang sesuai dengan nilai yang selalu mencari kepuasan atas kebutuhannya
- c. Pendekatan klasik, yang meliputi ide inovasi yang diusung oleh para ekonom⁷
- d. Teori Administrasi

⁷ Pendekatan ini sama dengan mengadopsi Teori Ekonomi

e. Teori Kepemimpinan

f. Pendekatan *intrapreneurship*

Meskipun sudah diungkapkan, bahwa membuat definisi kewiraswastaan adalah hal yang ekstrim sulit, dan setelah menyimak penelusuran pendekatan yang digunakan dalam menciptakan definisi begitu beragam, maka ungkapan membuat definisi tunggal yang jelas bagi kewiraswastaan adalah ekstrim sulit menjadi kenyataan. Namun, demi mendapatkan wawasan yang luas dan lengkap tentang kewiraswastaan, bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menyajikan beberapa definisi yang telah dicoba dibuat berbagai sarjana, berdasar perjalanan pendekatan definisi yang digunakan di atas.

Kewiraswastaan merupakan terjemahan dari *entrepreneurship*, yang merupakan istilah yang dari Bahasa Perancis *entrepreneur*, yang diturunkan dari kata *entreprendre*. Istilah ini pertama kali muncul dalam tulisan Richard Cantillon (1755), yang berjudul "Essai sur la Nature du Commerce en Général". Tiga ratus tahun kemudian, muncul dalam bentuk kata benda, setelah itu kedua kata benda dan kata kerja segera masuk dalam bahasa Inggris. Menurut Cantillon, sebagaimana dikutip Rusu et al (2012), *entrepreneur* merefer pada seorang yang membeli produk pada harga yang diketahui dan menjualnya kembali di pasar pada harga yang tidak diketahui.

Definisi kewiraswastaan yang dikemukakan Cantillon itu menjadi yang pertama, yang pada kajian kewiraswastaan berikutnya selalu dikutip oleh para penulis dan peneliti, sebelum mereka mengajukan definisi mereka sendiri (Quintero et al, 2019). Warga Perancis lainnya, ekonom Jean Baptiste Say, sekitar tahun 1800-an, mengajukan definisi kewiraswastaan sebagai seorang yang mentransfer sumber daya dari orang yang memiliki produktivitas lebih rendah kepada orang lain yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan meningkatkan keuntungan. Kata-kata meningkatkan keuntungan itu, ditangan Vlasceanu (2010) menjadi definisi lain kewiraswastaan, yaitu penciptaan nilai (*value creation*). Kesempatan mendapatkan keuntungan itu, sepertinya selalu diasosiasikan dengan definisi kewiraswastaan yang banyak dianut para

pemerhati studi bidang ini, sebagaimana dirangkum Amengot et al (2017) dari Cantillon (1755), Say (1803), Schumpeter (1934), Penrose (1959), Baumol (1968), Casson (1982), Shane & Venkataraman (2000), Swedberg (2000), Langlois (2002), Robert & Woods (2005), dan Peris-Ortiz (2009).

Pada tahap-tahap awal, belum ada pembedaan definisi yang ketat antara *entrepreneur* (wiraswastawan) dengan *entrepreneurship* (kewiraswastaan)¹⁰, seperti yang telah dilakukan Cantillon dan Say. Namun demikian, sepertinya pada permulaan perkembangan kewiraswastaan itu definisi lebih menitikberatkan pada orangnya (wiraswastawan). Schumpeter (2017)¹¹ dan Shakirtkhanov (2017), misalnya, memberikan definisi sebagai orang yang membuat kombinasi baru yang menyebabkan ketidakberlanjutan (*discontinuity*). Realisasi kombinasi baru itu meliputi produk baru atau produk lama dengan kualitas baru, metode produksi baru, penemuan sumber baru bahan baku, atau penemuan baru organisasi industri. Selanjutnya Hoselitz (2006) memberikan definisi sama dengan Say, yaitu orang yang membeli pada harga tertentu, kemudian menjual dengan harga yang tidak pasti. Leibenstein (1968) mengajukan definisi kewiraswastaan yang mirip dengan yang dibuat Schumpeter, yaitu seorang yang memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk dan menjualnya ke pasar untuk merespon adanya defisiensi pasar.

Kirzner (1985) mengikuti pola definisi umum yang menitikberatkan keuntungan, dengan merumuskannya sebagai orang yang mencium adanya kesempatan mendapatkan keuntungan, kemudian berinisiatif melakukan tindakan untuk mengisi kesempatan itu dengan memenuhi ketidaknyamanan berupa kebutuhan saat ini. Hal yang sama dilihat oleh Bygrave & Hofer (1991), yang kemudian merumuskan definisinya sebagai orang yang melihat kesempatan, kemudian

¹⁰ Hansmark (1998), menyebut definisi kewiraswastaan membingungkan, bahkan dalam titik tertentu kontroversial.

¹¹ Terbit pertama tahun 1934

membuat organisasi untuk mengikutinya¹². Cuervo et al (2010) mengajukan definisi wiraswastawan sebagai individu yang mendeteksi atau menciptakan kesempatan bisnis, kemudian mengeksploitasinya dengan perusahaan kecil menengah, dan biasanya mengambil bagian dalam bidang pembiayaan permodalan dari perusahaan atau hanya menjual ide proyek bisnis.

Tak kalah menarik juga definisi yang dibuat oleh Lazear (2005), yang menyatakan bahwa wiraswastawan adalah orang yang terspesialisasi dalam memikirkan keputusan atas koordinasi keterbatasan sumber daya. Definisi ini mirip dengan salah satu definisi ilmu ekonomi, yaitu menentukan pemilihan penggunaan atas sumber daya yang terbatas. Begitu pula dengan Panda (2000: 4), yang mengajukan definisi wiraswastawan dengan rincinya menjadi tiga tugas, yaitu (a) wiraswastawan bertugas menggunakan faktor produksi, membeli bahan baku dan membuat organisasi; (b) wiraswastawan bertugas mengambil bagian atas proses manajerial inovasi, pengawasan, dan koordinasi atas kegiatan produktif; (c) wiraswastawan bertugas ambil bagian dalam keputusan kewiraswastaan.

Pada perkembangan selanjutnya, definisi mulai menitikberatkan pada istilah kewiraswastaan. Cole (1968) memulai dengan mendefinisikan kewiraswastaan sebagai aktivitas yang didedikasikan pada inisiasi, pemeliharaan dan pembangunan bisnis yang berorientasi keuntungan. Pakar manajemen paling ternama di abad 20, Peter Drucker (1985), mendefinisikan sebagai sebuah tindakan inovasi yang mengandalkanberkah sumber daya yang ada memiliki kapasitas untuk memproduksi kekayaan. Gartner (1985) memberikan definisi yang singkat, kewiraswastaan adalah penciptaan organisasi baru.

Sebaliknya, Hisrich & Peters (1989), mengajukan definisi yang cukup panjang. Menurut mereka, kewiraswastaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda, dengan nilai, dengan mengalokasikan waktu dan upaya yang dibutuhkan, menyaratkan mengambil risiko keuangan,

¹² Maksudnya mengikuti kesempatan dengan membentuk organisasi untuk memanfaatkan kesempatan itu

fisik dan sosial, kemudian mendapatkan imbalan berupa moneter (keuntungan) dan kepuasan pribadi. Stevenson et al (1989), memberikan definisi yang agak bertentangan dengan Drucker. Menurutnya kewiraswastaan adalah mengikuti kesempatan, tanpa mempedulikan keberadaan sumber daya. Berikutnya Kaish & Gilad (1991) datang dengan definisi bahwa kewiraswastaan adalah, *pertama*, merupakan semua proses dari sebuah penemuan, *kedua*, proses tindakan memanfaatkan kesempatan atas langkanya keseimbangan.

Herron & Robinson (1993) kembali mengajukan definisi yang agak panjang, yaitu kewiraswastaan merupakan serangkaian perilaku inisiasi dan mengelola pembagian sumber daya ekonomi yang tujuannya adalah penciptaan nilai melalui peralatan (inisiasi dan pengelolaan sumber daya ekonomi). Martin & Osberg (2007: 31) juga mengajukan definisi yang cukup panjang, yaitu kewiraswastaan adalah produk kombinasi dari tiga elemen yang terdiri dari (1) Konteks dimana kesempatan muncul atau diciptakan; (2) Seperangkat kemampuan pribadi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan; (3) Kapasitas untuk memanfaatkan kesempatan dengan mentransformasikannya menjadi hasil.

Selain dilihat dari sisi perkembangan istilah, dari *entrepreneur* menjadi *entrepreneurship*, secara historis, ada juga definisi yang memperkaya dengan pembedaan antara wiraswastawan dengan investor (Rusu et al, 2012). Definisi ini mengarah pada harapan yang berkaitan dengan tindakan yang diambil. Wiraswastawan dipandang sebagai penyedia mental dan ketrampilan dalam mendirikan dan mengelola perusahaan, sedang investor merupakan penyedia modal yang bisa membiayai kegiatan wiraswastawan. Meskipun sebenarnya keduanya sama-sama berkarakter sebagai seorang wiraswastawan. Belakangan pembedaan ini relevan dengan perkembangan dunia kewiraswastaan, dimana investor mewujud dalam bentuk *venture capital* dan *angel investor* dan wiraswastawan mewujud sebagai orang yang membangun perusahaan rintisan (*start up*). Sinergi keduanya telah melahirkan banyak wiraswastawan muda yang sukses.

Diakui Karlsson et al (2004), bahwa banyak sekali definisi kewiraswastaan, baik ditinjau dari sisi teoritis maupun empiris. Namun dari banyak definisi tersebut, kata kunci yang

mencerminkan definisi secara umum adalah proses dan peran. Sebagian besar ekonom, psikolog dan sosiolog menyetujui bahwa kewiraswastaan merupakan aktivitas proses, bukan fenomena statis dan memiliki peran fungsional (Pirich 2001: 14–15; Schoof 2006).

Kirzner (1973; 1985) memberikan definisi yang tidak lepas dari kata proses dan peran, yaitu kewiraswaataan sebagai proses penemuan dari hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan—bahkan sering dimarginalkan—namun pada akhirnya memberikan kesempatan mendapatkan keuntungan. Klapper et al. (2010), yang memandang dari sisi praktisi, menyatakan kewiraswastaan umumnya merupakan proses penciptaan kekayaan baru.

Frijs et al (2002: 1-2) dan Jääskeläinen (2000: 5) yang mewakili pandangan yang menitikberatkan pada peran fungsional kewiraswastaan dalam mendefinisikan, mencatat tiga peran fungsional yang paling sering disebut dalam definisi kewiraswastaan:

- a. Berani mengambil risiko (*risk seeking*). Secara alami dan naluri, wiraswastawan semestinya orang yang berani mengambil risiko. Karena itu kewiraswastaan tidak bisa dilepaskan dari peran fungsional sebagai pengambil risiko.
- b. Inovatif. Seorang wiraswastwan juga dikenal sebagai orang yang selalu kreatif, sehingga selalu bisa menemukan hal-hal baru atau hal-hal lama yang tidak dipikirkan orang lain. Inilah yang menyebabkan peran fungsional kewiraswastaan yang sering muncul dalam definisi kewiraswastaan, yaitu sikap keinovatifannya (*innovativeness*). Peran ini banyak dianut oleh Schumpeterian¹³.
- c. Mencari kesempatan (*opportunity seeking*). Peran ini banyak dianut oleh Kirznerian. Menurut definisi kelompok ini, kewiraswastaan selalu berusaha mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (OECD 1998: 11; Carree and Thurik 2002: 8)

¹³ Cara lain mendefinisikan kewiraswastaan yang cukup banyak diterima adalah dengan melihat sudut pandang yang diambil. Berdasar cara ini, ada tiga aliran utama, yaitu Shumpeterian, Kirznerian, dan sudut pandang historis (seperti diulas di awal bagian ini) atau juga disebut tradisi Chicago (Herbert & Link, 1989).

Dari definisi yang menitikberatkan pada peran fungsional ini, Wennekers and Thurik (1999: 46-47) mencoba membuat definisi operasional yang cukup banyak diterima di kalangan sarjana kewiraswastaan, yaitu kewiraswastaan merupakan manifestasi dari kemampuan dan kemauan individu, baik dalam posisi individual maupun tim—di dalam maupun di luar organisasi—untuk mencapai dan menciptakan kesempatan ekonomi baru berupa produk baru, metode produksi baru, skema organisasi baru dan kombinasi produk-pasar baru, dan untuk mengenalkan ide-idenya di pasar guna menghadapi ketidakpastian maupun tantangan lain, dengan membuat keputusan lokasi, bentuk, penggunaan sumber daya, dan institusi.

Mengakhiri bagian ini mungkin relevan mengutip pendapat Brockhaus & Horwitz (1986); Sexton & Smilor (1986); dan Gartner (1988), bahwa diantara para penulis dan praktisi telah terjadi inkonsestensi dalam mendefinisikan kewiraswastaan. Meski demikian, paling tidak bisa disimpulkan definisi kewiraswastaan mencakup dan menekankan rentang aktivitas yang luas, seperti penciptaan organisasi, membawa kombinasi baru, mengeksplorasi kesempatan, menanggung ketidakpastian, membawa secara bersama faktor produksi, dan lain sebagainya. Intinya, dari banyak definisi itu secara gamblang menjelaskan adanya perbedaan alami definisi dan konsep kewiraswastaan.

2.2. Peran Kewiraswastaan Dalam Pembangunan Ekonomi

Dua kata yang paling dikenal, atau paling tidak, tidak asing bagi sebagian besar masyarakat di dunia saat ini adalah *entrepreneursihp* dan industri 4.0. Untuk *entrepreneurship*, seperti telah diungkap sebelumnya, telah melahirkan lebih dari 1000 publikasi per tahun. Bahkan di kalangan perguruan tinggi (paling tidak di Indonesia), *entrepreneurship* atau kewiraswastaan mendapat perhatian yang istimewa. Banyak universitas membuka program studi khusus kewiraswastaan maupun mengadopsi kewiraswastaan dalam kurikulum dan program kegiatan

kemahasiswaan. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa berbagai kalangan menjadi antusias terhadap kewiraswastaan ini?

Ini berangkat dari melemahnya kemampuan anggaran pemerintah di seluruh dunia dalam membiayai kelahiran kesempatan kerja. Atau jelasnya, dalam bahasa ekonomi, anggaran pengeluaran pemerintah untuk investasi semakin sedikit. Sehingga pemerintah tidak mampu membuat proyek yang bisa diandalkan untuk menyerap angkatan kerja yang semakin hari semakin banyak. Mengapa kemampuan pemerintah menurun? Ini disebabkan makin seringnya terjadi krisis keuangan yang berskala global, yang sering kali menuntut pemerintah harus membuat langkah-langkah penyelamatan (*bail out*) dari krisis tersebut. Akibatnya, anggaran yang semula dialokasikan untuk menciptakan proyek yang bisa membuka kesempatan kerja, beralih untuk mengatasi masalah krisis keuangan, terutama mem-*bail out* perusahaan-perusahaan besar yang kebangkrutannya bisa berdampak sistemik.

Krisis keuangan 2008, misalnya, yang membangkrutkan salah satu perusahaan bank investasi terbesar dan tertua di dunia, Lehman Brothers, telah membuat banyak perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia memperkecil skala usahanya atau malah bangkrut (Barron, et al 2012; Chowdhury, 2011; Hande, 2016). Hampir seluruh pemerintah di dunia mengambil langkah penyelamatan, untuk mencegah krisis keuangan menjadi berdampak sistemik. Pemerintah Indonesia sendiri mengambil langkah penyelamatan dengan mem-*bailout* Bank Century, senilai Rp. 6,7 triliun¹⁴. Andai anggaran ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan berapa orang terbebas dari kemiskinan? Selain menghilangkan kemampuan pemerintah menciptakan kesempatan kerja, menurut studi OECD (2010), kebangkrutan perusahaan—terutama perusahaan kecil dan menengah—akibat krisis keuangan juga menyebabkan hilangnya peran mereka sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, sumber

¹⁴ Bahkan untuk krisis ekonomi yang disebabkan wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana ekstra sebesar Rp 405,1 triliun. Untuk stimulus pemulihan ekonomi sendiri dialokasikan Rp 150 triliun. Sedang Pemerintah yang tergabung dalam G-20 mengalokasikan dana hingga 6,3 triliun dollar AS.

dinamisme, inovasi dan fleksibilitas. Ini bisa dilihat dari menurunnya kontribusi dalam PDB, penciptaan pekerjaan baru, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Singkat cerita, dengan menurunnya peran pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja, masyarakat harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan pekerjaan. Alternatif tersebut adalah menjadi wiraswastawan. Tak dapat dipungkiri, kewiraswastaan memang sebagai obat manjur bagi berbagai penyakit, mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga inovasi. Paling tidak kewiraswastaan memang telah terbukti sebagai pencipta lapangan kerja (Katua, 2014), baik itu di negara maju maupun di negara berkembang (Schramm & Litan, 2009). Bahkan, lebih jauh lagi, kewiraswastaan telah mampu berperan sebagai mekanisme untuk mencapai arus pendapatan yang stabil dan memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki penduduk yang mudah tergelincir pada pengangguran, berpendapatan rendah, atau miskin (Karlan & Valdivia, 2011).

Secara langsung maupun tidak langsung, harus diakui pada akhirnya kewiraswastaan berperan besar dalam pembangunan ekonomi (Klapper et al. 2010). Secara teori, peran kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan menggunakan teori Schumpeter, yang menyatakan bahwa setiap orang bisa dikatakan wiraswastawan jika secara nyata orang tersebut mampu melakukan kombinasi atas faktor produksi. Mengombinasikan faktor produksi tersebut sesungguhnya adalah proses penemuan kewiraswastaan yang akan menjadi mesin yang mendorong pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pembangunan ekonomi itu akan terus bergulir. Jika mengikuti model standar pertumbuhan ekonomi negara berkembang, yaitu sekali suatu ekonomi memasuki fase industrialisasi, perubahan kaulitatif dalam pendorong pertumbuhan ekonomi pasti terjadi.

Pada perkembangannya memang ada perpecahan model dalam pembangunan ekonomi itu. Model yang berkembang di negara maju, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kemajuan teknologi dan akumulasi pengetahuan, yang diwujudkan dalam bentuk penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi. Sebaliknya, model (biasanya dilakukan negara

berkembang) yang dikembangkan melalui proses kewiraswastaaan, nemun melalui imitasi. Pada model ini, pertumbuhan ekonomi tidak dorong oleh adanya inovasi sebagai hasil dari penelitian dan pengembangan, melainkan dari imitasi atas produk hasil inovasi negara maju (Schmitz, 1989). Apapun model yang digunakan, pastinya ada peran kewiraswastaaan di dalamnya.

Secara empiris, cukup banyak literatur yang menjelaskan peran kewiraswastaaan dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah Carree & Thurik (2002), yang mengukur peran kewiraswastaaan dalam pembangunan ekonomi dengan menyajikan angka pangsa relatif perusahaan kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang paling aktif memonitor kaitan antara kewiraswastaaan dengan pembangunan ekonomi adalah GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Lembaga internasional ini rutin mengeluarkan laporannya setiap tahun tentang tingkat kegiatan nasional kewiraswastaaan masing-masing negara. Cara mengukur tingkat kegiatan kewiraswastaaan itu adalah dengan menghitung seberapa besar pangsa angkatan kerja suatu negara dalam melahirkan usaha baru atau mengelola usaha. GEM menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat kegiatan kewiraswastaaan itu dengan pertumbuhan ekonomi.

Mendapati peran penting kewiraswastaaan dalam pembangunan ekonomi, ditambah lagi adanya dampak krisis keuangan berupa kebangkrutan banyak perusahaan yang berdampak pada makin banyaknya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan lemahnya inovasi, membuat pemerintah mulai memperhatikan kewiraswastaaan (Cho and Honorati, 2013). Pemerintah semakin mendukung dan memfasilitasi kelahiran wiraswastawan-wiraswastawan baru. Pada akhirnya pemerintah juga mulai menyelenggarakan program PPK untuk berbagai kalangan. Lebih jauh lagi, kewiraswastaaan malah dijadikan strategi pembangunan di banyak negara. Kewiraswastaaan telah menjadi katalis utama untuk pembangunan bisnis dan ekonomi secara kontinyu. Volkmann et al (2009), misalnya, menunjukkan bagaimana kewiraswastaaan telah dijadikan sebagai alat untuk berperang melawan masalah-masalah sosial, seperti kegiatan kriminal yang dilakukan para pemuda pengangguran.

Pemerintah mulai banyak membuat kebijaksanaan dan peraturan dalam bidang kewiraswastaan. Welter (2011), misalnya, menunjukkan bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi perkembangan kewiraswastaan melalui pembentukan konteks, yaitu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kewiraswastaan. Selain konteks, pemerintah juga bisa membuat kebijaksanaan dalam bidang keuangan, yang bisa memberikan akses keuangan bagi para wiraswastawan. Pendek kata pemerintah telah membuat kebijaksanaan yang pada prinsipnya menghilangkan semua hambatan dan mempromosikan kewiraswastaan (de Mel et al, 2009).

2.3. Pelatihan Kewiraswastaan

Seiring dengan makin meluas dan intensnya penerimaan kewiraswastaan dari berbagai kalangan, bahkan dijadikan salah satu strategi pembangunan ekonomi, PPK juga mendapatkan sambutan yang luar biasa antusias. Baik kalangan peneliti, praktisi maupun pembuat kebijaksanaan banyak membuat aktivitas yang objek utamanya adalah kewiraswastaan. Seperti telah diinformasikan, lebih dari 1000 publikasi tentang kewiraswastaan diterbitkan setiap tahun. Kalangan pemerintah juga tidak kalah sigap, mereka memanfaatkan kewiraswastaan untuk mengatasi masalah pengangguran, terutama ketika terjadi dampak krisis keuangan. Pendek kata, intervensi berupa PPK telah menjadi skenario umum untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan mengatasi krisis keuangan dibanyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang.

Garavan & O'Conne'ide (1994a) menemukan cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa kewiraswastaan dapat diperoleh dari kebudayaan maupun pengalaman. Temuan ini secara tidak langsung memberikan dukungan pandangan bahwa kewiraswastaan bisa dipengaruhi oleh intervensi PPK. Dengan kata lain yang lebih populer dan menajadi perdebatan, kewiraswastaan dapat diajarkan dan dipelajari (Timmons & Spinelli, 2004; Henry et al, 2005; Kuratko, 2005).

Namun tidak semua setuju dengan pendapat ini. Haase & Lautenschläger (2011), misalnya, melalui penelusurannya tentang dapat tidaknya kewiraswastaan diajarkan, menyajikan tidak kalah banyak temuan yang menunjukkan bahwa kewiraswastaan tidak dapat diajarkan. Akola & Heinonen (2006) sepertinya mencoba menyediakan jalan tengah dengan membagi topik kewiraswastaan menjadi dua, yaitu sisi seni dan sisi keilmuan. Sisi seni, seperti kreativitas dan pemikiran inovatif, tidak dapat diajarkan. Aspek ini hanya bisa dipelajari melalui pengalaman praktis. Kemudian sisi keilmuan, seperti bisnis dan manajemen, dapat diajarkan. Menyadari hal itu Bank Dunia (World Bank, 2010) menyarankan agar PPK mengadopsi metode pengajaran yang melibatkan kreativitas dan ketrampilan kewiraswastaan. Jika hal itu bisa dilakukan maka kewiraswastaan dapat diajarkan. Dalam upaya mengakhiri perdebatan itu, Onstenk (2003) menawarkan jalan kelaur, bahwa andaipun PPK tidak menjadikan seseorang sebagai wiraswastawan, PPK masih bermanfaat dalam hal menyediakan calon pekerja yang lebih baik dan menjadikan warga lebih aktif.

Meskipun sejumlah pelaku kewiraswastaan internasional, regional, nasional dan lokal telah mengakui dan menerima serta turut ambil bagian dalam kegiatan kewiraswastaan, juga mengakui bahwa PPK sudah menjadi lapangan studi yang mapan, namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan PPK? Atau lebih spesifik lagi apa yang sebenarnya ruang lingkup PPK? Pendidikan dan pelatihan kewiraswastaan mengajarkan materi yang ruang lingkungannya terentang mulai dari pengembangan ketrampilan perorangan sampai penciptaan perusahaan yang inovatif. Pesertanya juga terentang dari berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan. Dengan demikian, sebenarnya dapat dikatakan kewiraswastaan merupakan ilmu pengetahuan umum yang bisa dipelajari oleh siapapun.

Secara ilmiah David A. Kirby (2004) mendefinisikan PPK sebagai kegiatan yang ditujukana pada pengembangan sifat kewiraswastaan orang¹⁵, dan meningkatkan pemahaman

¹⁵ Yang terpenting adalah pola pikir (*mind set*)

dan pengetahuan mereka tentang kewiraswastaan dan perusahaan. Secara umum ada definisi PPK yang bisa diterima, seperti yang dikemukakan oleh Charney & Libecap (2000); Farstad (2002); Menzies (2003); Isaacs et al (2007); dan Dickson et al (2008). Mereka merumuskan PPK sebagai kegiatan menyebarkan pola pikir (*mind set*) dan ketrampilan khusus yang berkaitan dengan kewiraswastaan dan program pendidikan dan pelatihan yang menyebabkan munculnya beragam hasil kewiraswastaan.

Jadi berdasar definisi di atas, fokus utama pengajaran PPK ada dua, yaitu pola pikir dan ketrampilan. Pengajaran pola pikir adalah bagaimana mengubah atau memasukkan cara berpikir kewiraswastaan kepada para peserta berupa ketrampilan sosio-emosional, seperti percaya diri, kepemimpinan, kreativitas, kecenderungan mengambil risiko, motivasi, daya tahan, dan kemahiran diri (Lüthje & Franke, 2003; Rauch & Frese, 2007; Teixeira & Forte, 2009; Hytti et al. 2010; Cloete & Ballard, 2011), kesadaran dan persepsi menyeluruh tentang kewiraswastaan (Kolvereid & Moen, 1997; Peterman & Kennedy, 2003; Fayolle et al, 2006; Souitaris et al, 2007). Sedang ketrampilan yang dimaksud adalah pengetahuan umum bisnis, serta ketrampilan yang dibutuhkan untuk membuka dan mengelola sebuah bisnis, seperti akuntansi, pemasaran, penilaian risiko, dan mobilisasi sumber daya (Curran & Stanworth 1989; Detienne & Chandler, 2004; Honig, 2004; Russell et al, 2008; Bjorvatn & Tungodden, 2010; Karlan & Valdivia, 2011).

Sementara itu, ada literatur-literatur yang cukup menonjol yang membedakan antara PPK dengan pendidikan bisnis manajemen. Mereka menyatakan pendidikan bisnis manajemen secara tradisional melatih para mahasiswa untuk mengelola perusahaan secara hierarkis, sesuai dengan struktur organisasinya, dan mengabdikan sebagai manajer di perusahaan yang sudah mapan (Sexton & Bowman 1984). Farstad (2002), mengakui adanya indikasi bahwa PPK melampaui pendidikan bisnis manajemen, dimana PPK mengajarkan kondisi-kondisi unik yang dihadapi wirausahawan. Garavan & O'Connell (1994a) menunjukkan bagaimana sekolah bisnis menggunakan model untuk melatih pesertanya menganalisis informasi dalam jumlah besar untuk mendapatkan solusi, sedang PPK memberikan wirausahawan bagaimana mengoperasikan

perusahaan dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan waktu, bahkan dalam kondisi informasi yang kredibilitasnya terbatas. Berikutnya Vesper & McMullan (1998) membedakan PPK dengan pendidikan bisnis manajemen dari fokus materi yang diberikan. Menurut mereka PPK lebih fokus pada membangun kesadaran kewiraswastaan dan pengembangan ketrampilan spesifik guna menciptakan produk atau pelayanan baru untuk membuka atau memperluas perusahaan.

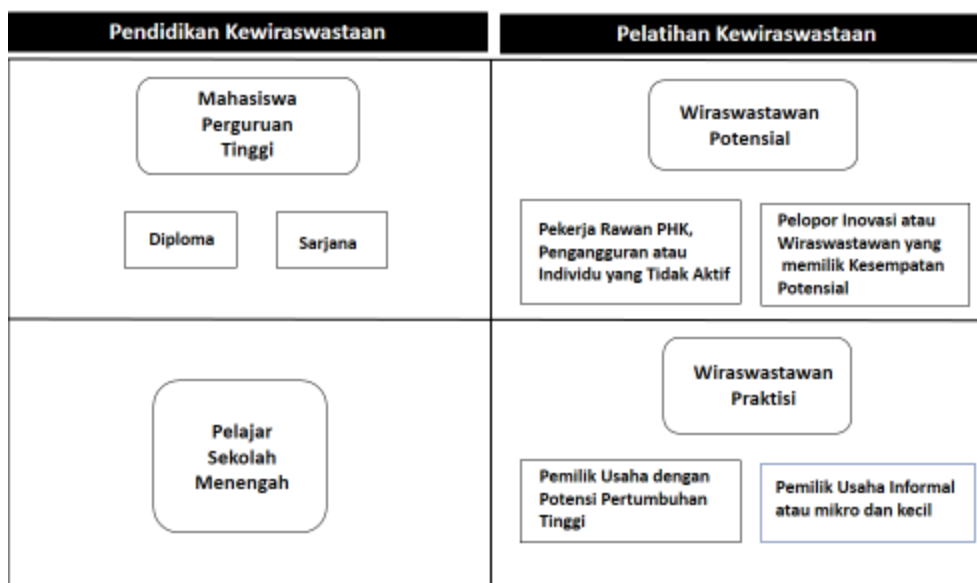
Dari istilah yang digunakan, PPK, sebenarnya juga sudah tersirat adanya perbedaan itu. PPK jelas mengandung dua istilah dalam mengajarkan kewiraswastaan, yaitu pendidikan dan pelatihan. Meskipun menurut De Faoite et al (2013) dalam pelaksanaan di lapangan sering kali masih membingungkan. Garavan & O'Conneide (1994a), misalnya menggunakan kedua istilah sekaligus untuk menyebut pendidikan dan pelatihan bagi para pemilik UMKM atau praktisi kewiraswastaan. Meskipun mereka juga memisahkan pendidikan dan pelatihan untuk pengajaran bagi mahasiswa. Dituliskan kedua, Garavan & O'Conneide (1994b) sudah merinci pelatihan kewiraswastaan untuk praktisi. Artinya sudah memisahkan dari pendidikan kewiraswastaan. Rincian lebih lanjut dapat disimak tulisan Henry et al (2005), yang memisahkan antara pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ditujukan untuk tujuan akademik, sehingga pesertanya adalah para mahasiswa dan pelajar, sedang pelatihan menyasar peserta dari kalangan non akademik. Untuk kalangan akademik, pendidikan kewiraswastaan berkembang menyasar ke pelajar sekolah menengah (Hägg & Gabrielsson, 2019). Sedang untuk kalangan non akademik, pelatihan bisa diberikan kepada praktisi dan yang berpotensi menjadi wiraswastawan, seperti mereka yang belum mempunyai pekerjaan dan kehilangan pekerjaan (World Bank 2012a).

Dari kajian mengenai PPK itu, dapatlah dibuat klasifikasi PPK menjadi empat bagian, berdasar tipe pengajaran dan target pesertanya. Dari tipe pengajaran, PPK dapat diklasifikasikan menjadi dua, sesuai dengan istilah yang dipakai, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan, lengkapnya menjadi pendidikan kewiraswastaan (*entrepreneurship education/EE*), adalah pengajaran kewiraswastaan yang fokusnya adalah membangun pengetahuan dan ketrampilan tentang tujuan dari kewiraswastaan. Sedang pelatihan, lengkapnya pelatihan kewiraswastaan

(*entrepreneurship training/ET*), fokus pengajarannya adalah membangun pengetahuan dan ketrampilan, yang secara eksplisit untuk menyiapkan pesertanya untuk memulai atau mengoperasikan perusahaan (Volkman et al, 2009; GEM, 2010). Jadi dari tipe pengajaran ini diperoleh dua klasifikasi, yaitu pendidikan dan pelatihan kewiraswastaan.

Selanjutnya, dari dua klasifikasi itu, masing-masing bisa diklasifikasikan lagi berdasar target peserta. Untuk pendidikan kewiraswastaan, target pesertanya adalah pelajar, sedang pelatihan kewiraswastaan, target pesertanya adalah wiraswastawan. Dari peserta pelajar inipun dapat dipilah lagi menjadi pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, dari peserta mahasiswa, masih bisa dipilah lagi menjadi peserta dari kalangan D1-D4 (*undergraduate*) dan S1 (*graduate*). Sementara dari pelatihan kewiraswastaan yang target pesertanya adalah wiraswastawan, juga masih bisa diklasifikasikan lagi menjadi wiraswastawan yang masih potensial dan wiraswastawan yang sudah praktik (praktisi kewiraswasrtaan). Selanjutnya, dari masing-masing target peserta wiraswastawan itu, juga masing-masing bisa dipilah lagi. Untuk palatihan kewiraswastaan yang pesertanya adalah wiraswastawan potensial, dapat dibagi menjadi dua, yaitu peserta dari kalangan rawan menjadi pengangguran, pengangguran, dan perorangan yang tidak aktif; dan para inisiatotor penemu (*innovation led*) atau wiraswastawan yang berpotensi memanfaatkan kesempatan (*opportunistic potential entrepreneur*). Berikutnya untuk pelatihan kewiraswastaan yang target pesertanya adalah praktisi kewiraswastaan, bisa dibagi dua, yaitu wiraswastawan pemilik UMKM dan pemilik perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi (lihat gambar 2.1).

Selain masalah adanya perbedaan antara PPK dengan pendidikan bisnis manajemen, ada lagi persoalan yang juga memerlukan pemikiran yang cukup intens, yaitu masalah konten PPK. Meskipun fokus PPK sudah dapat diidentifikasi, yaitu pola pikir dan ketrampilan kewiraswastaan, namun materi yang akan diberikan masih belum mendapatkan kesepakatan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam penyelenggaraan PPK, misalnya tentang lama waktu penyelenggaraan PPK, target peserta, ketersediaan sumber daya, dan persepsi keunggulan terhadap program multi konten dari beragam program PPK yang dapat diserap.



Gambar: 2.1. Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan Kewiraswastaan

Kondisi seperti itu disadari oleh Garavan & O'Kinneide (1994a), sehingga mereka mengakui betapa sulitnya menentukan tujuan dan konten dari suatu PPK. Pada akhirnya mereka pun mengkritisi, bahwa setiap karir di bisnis melibatkan beberapa kombinasi dari pengetahuan, teknik, dan ketrampilan orang, namun sedikit yang mengintegrasikan dan mengombinasikan fungsi-fungsi pengetahuan dan ketrampilan itu lebih luas pada apa yang dilakukan oleh kegiatan kewiraswastaan. Meskipun sudah terbukti, bahwa pengetahuan dasar-dasar bisnis yang dibutuhkan dalam menjalankan kewiraswastaan dapat diajarkan di kelas, tetapi belum ada teori yang bisa mendukung apakah menjadi wiraswastawan yang bisa mengatasi ketidakpastian yang selalu ada di lingkungan bisnis baru?

Akibatnya tidak ada konten yang sama dalam setiap program PPK. Masing-masing sarjana membuat dan mengusulkan konten yang berbeda. Tabel 2.1 merangkum konten yang dibuat berbagai sarjana (Azim, 2013). Konten itu terentang mulai dari materi spesifik, seperti perencanaan bisnis (*business plan*) hingga yang menyajikan materi yang komprehensif yang meliputi pemanfaatan kesempatan hingga proses penciptaan dan manajemen bisnis yang

meliputi tiga aspek esensial dalam kewiraswastaan yang terdiri wiraswastawan, perusahaan dan lingkungan bisnis.

Tabel 2.1 Konten Program PPK

Sarjana	Konten
Timmons et al (1987)	<i>Business plan</i>
Johannisson (1991)	Pengetahuan-Mengapa (sikap, nilai, motivasi) Pengetahuan-Bagaimana (kamampuan) Pengetahuan-Siapa (ketrampilan jangka pendek dan jangka panjang) Pengetahuan-Kapan (intuisi) Pengetahuan-Apa (pengetahuan)
Noll (1993)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelidiki keinginan terdalam konsumen, melakukan penilaian diri tentang kreativitas personal, melakukan studi kelayakan, dan mengidentifikasi berbagai strategi memasuki bisnis 2. Menilai sumber daya personal status keuangan, menyelidiki dan mengevaluasi risiko untuk memulai (bisnis), menulis rencana kerja bisnis, mendekati pihak lain untuk mendapatkan pendanaan dan sumber daya lainnya. 3. Mempelajari alokasi sumber daya, menggunakan berbagai strategi pemasaran, mengelola keuang dan personalia
Garavan & O'Conneide (1994)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahap Formasi <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan: Pengetahuan bisnis umum • Konten : dunia bisnis, kewiraswastaan, karakteristik tim yang efektif, kegiatan dan transaksi bisnis ▪ Tahap Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan : Ketrampilan dan sikap • Konten : Perencanaan bisnis, seleksi pasar, perencanaan keuangan, identifikasi produk dan membuat presentasi keuangan ▪ Tahap Implementasi <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan : Pengetahuan dan sikap • Konten : Perencanaan keuangan, mengelola pertumbuhan perusahaan, fungsi manajemen dan sikap, membuat transaksi dari wiraswasta kepada manajer
Kourilsky (1995)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesempatan pengakuan: identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar dan menciptakan ide bisnis. Observasi pasar, mendalami kebutuhan konsumen, invensi dan inovasi ▪ Menyusun dan komit atas sumber daya: bersedia mengambil risiko juga ketrampilan dalam mengamankan investasi dari luar ▪ Menciptakan operasi bisnis: keungan, pemasaran, dan ketrampilan manajemen
Rae (1997)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketrampilan komunikasi, khususnya persuasi ▪ Ketrampilan kreativitas ▪ Berpikir kritis dan ketrampilan menilai ▪ Ketrampilan kepemimpinan ▪ Ketrampilan negosiasi ▪ Ketrampilan memecahkan masalah ▪ Ketrampilan manajemen waktu

Lanjutan

Hisrich dan Peters (1998)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketrampilan teknis: meliputi komunikasi lisan dan tulisan, manajemen teknis dan ketrampilan organisasi ▪ Ketrampilan manajemen bisnis: meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pemasaran dan ketrampilan akuntansi ▪ Ketrampilan kewiraswastaan pribadi: meliputi control dari dalam, inovasi, pengambilan risiko dan inovasi
Vesper dan Gartner (2001)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep kewiraswastaan ▪ Karakteristik kewiraswastaan ▪ Nilai kewiraswastaan ▪ Ketrampilan kreativitas dan inovasi ▪ Kewiraswastaan dan etika penilaian diri sendiri ▪ Jejaring kerja, negosiasi dan membuat kesepakatan ▪ Identifikasi dan evaluasi kesempatan ▪ Komersialisasi konsep ▪ Membangun strategi masuk (industri/bisnis) ▪ Mengonstuksi perencanaan bisnis ▪ Mendapatkan modal ▪ Inisiatif bisnis ▪ Menumbuhkan bisnis ▪ Strategi memanen
Jeroen Onstenk (2003)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivasi, kebutuhan otonomi dan independensi, kreativitas dan orisinalitas, mengambil inisiatif, mengambil risiko, mencari kesempatan, menghadapi tantangan obyektif, percaya diri, pengendalian diri, dan ketahanan ▪ Manajemen operasional, organisasi dan personal, administrasi keuangan, pemasaran, manajemen keuangan, dan membuat perencanaan bisnis ▪ Mendapatkan kesempatan bisnis, interpretasi informasi pasar dan pengembangan orientasi konsumen untuk mengembangkan dan mengefektifkan jejaring relasi operasi dan membangun organisasi yang inovatif

Sumber: Azim (2013)

Metode pengajaran juga relevan untuk ditinjau ketika membicarakan tentang PPK. Alasannya, sebaik apapun konten yang dirancang dan sehebat apapun instruktur yang menyampaikannya, kalau metode pengajaran yang digunakan tidak tepat, besar kemungkinan PPK tidak akan mendapatkan respon positif dari peserta, dan juga tujuan PPK itu sendiri tidak akan tercapai, seperti dikatakan McLuhan's (2000) yang terkenal: "medium is the message". Pernyataan itu mengisyaratkan betapa pentingnya peran media penyampaian dalam ranah pengajaran. Media penyampaian itulah yang dimaksud dengan metode pengajaran. Ada banyak metode pengajaran, seperti kuliah, presentasi, penyediaan *hand out*, pemutaran video, studi kasus, diskusi kelompok, hingga permainan peran (*role play*), ujian terutulis, lokakarya,

bimbingan/pementoran, kunjungan belajar (*study visit*), membangun bisnis, permainan dan pertandingan, simulasi dengan bantuan computer, dan magang (Hytti et al, 2002).

Dari sekian banyak metode pengajaran itu, tentu tidak semua relevan atau cocok digunakan untuk mengajarkan program PPK. Metode pengajaran tradisional dengan pendekatan kuliah dengan materi yang lebih banyak menyajikan teori, misalnya, tidak cocok untuk menyampaikan konten PPK (Gibb, 1997; Henry et al, 2005, Davies and Gibb (1991). Apalagi kalau materi yang menjadi konten pengajaran adalah berupa pengalaman dan ketrampilan praktis kewiraswastaan, maka praktis metode pengajaran tradisional tidak dapat digunakan.

Ini disebabkan, pengajaran kewiraswastaan lebih menghendaki para peserta untuk aktif, seperti berdiskusi untuk mengambil keputusan (Kourilsky & Carlson, 1996), aktif mencari pasar baru atau melahirkan ide bisnis baru (Kourilsky, 1995). Salah satu metode yang juga menghendaki peserta aktif adalah model *best practice* (Breen, 1999; Lewis & Massey 2003). Metode mengajarkan kewiraswastaan dari praktik-praktik kewiraswastaan yang sudah terjadi dan relevan untuk dipelajari. Metode ini bertujuan membantu secara efektif dalam hal pengembangan perusahaan, dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan dorongan atau inisiatif dominan dari peserta. Di sini peserta dibutuhkan sebagai agen yang aktif, dan program harus secara eksplisit mempromosikan transparansi, yaitu kemampuan peserta untuk menransfer ketrampilan yang mereka pelajari dari program PPK ke seting konteks yang berbeda.

Kirby (2004) dan Nieuwenhuizen & Groenwald (2004) mengkritisi metode pengajaran PPK dari fakta yang menunjukkan, cukup banyak wiraswastawan sukses tidak lahir dari sistem pendidikan formal atau dari mereka yang prestasi akademiknya baik. Dengan fakta itu mereka ingin menjelaskan bahwa metode pengajaran formal akademik tidak relevan untuk menyampaikan program PPK. Argementasi mereka berangkat dari ditemukannya fakta bahwa ketrampilan atau kesuksesan kewiraswastaan ditentukan oleh otak kanan. Seperti diketahui, pekerjaan otak kiri lebih pada bahasa, logika dan simbol. Otak kiri bekerja dengan fokus yang sempit dan sistematis. Sebaliknya otak kanan bertugas mengendalikan emosi, intuisi dan fungsi

spasial. Otak kanan bekerja secara lateral, tidak konvensional, tidak sistematis dan tidak terstruktur. Cara kerja inilah yang menjadi jantungnya proses kreatif yang sangat dibutuhkan di bidang kewiraswastaan.

Adanya unsur kreativitas yang penting dalam kewiraswastaan, ditambah dengan kewiraswastaan itu sendiri adalah seni, dan bukan disiplin ilmu, membuat pengajaran PPK dengan metode kelas perlu dipertimbangkan (Godtfredsen, 1997). Metode pengajaran seni di kelas, kadang-kadang digunakan untuk mendorong peserta mengembangkan kreativitas mereka. Faktanya, kewiraswastaan sendiri sudah seni, sehingga tidak perlu didorong lagi. Oleh karena itu Godtfredsen (1997) menganjurkan penggunaan metode studi kasus untuk pengajaran program PPK. Studi kasus dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah berpikir kreatif. Yang dibutuhkan pengajar bukanlah ketrampilan menyediakan jawaban yang benar, melainkan membantu peserta mengeksplorasi alternatif dan memikirkannya. Dengan demikian, peserta bisa dilibatkan dalam studi kasus dalam bentuk kelompok kerja dan belajar bagaimana berkerja memecahkan masalah dalam kelompok kerja dalam rangka kerja sama tim, *brainstorming*, memanfaatkan aneka gugus tugas, dan bentuk-bentuk kegiatan lain di luar kelas.

Meskipun metode pengajaran dengan pendekatan tradisional (pengajaran teori dikelas), dianggap tidak relevan untuk mengajarkan program PPK, dan sebagai gantinya telah banyak ditemukan pendekatan baru, yang lebih menekankan peserta lebih aktif, bukan berarti teori harus diabaikan. Fiet (2000), masih percaya pengajaran program PPK masih memerlukan bantuan konten teori dalam rangka mengembangkan ketrampilan kognitif yang diperlukan dalam membuat keputusan kewiraswastaan yang lebih baik.

2.4. Peran Pemerintah Dalam PPK

Kenyataan bahwa pemerintah semakin berkepentingan dengan kewiraswastaan tak dapat dipungkiri, bahkan harus menjadi keniscayaan. Bahkan di banyak negara, terutama di negara sedang berkembang, pemerintah menginvestasikan begitu besar sumber daya dan juga

usaha untuk mengembangkan kewiraswastaan (Oni and Daniya, 2012). Pemerintah China, misalnya, membuat upaya melalui kebijaksanaan dan mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan kewiraswastaan dengan memfasilitasi lahirnya bisnis berteknologi tinggi (Cullan et al, 2014). Sementara itu Pemerintah Arab Saudi, sejak 2010 mengalokasikan upaya dan sumber dayanya untuk membuat program 10 tahun pengembangan kewiraswastaan dan inovasi (Salem. M. 2014).

Hal ini terjadi akibat semakin menurunnya kemampuan pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja melalui anggaran pemerintah, baik itu akibat persaingan alami dalam kancah ekonomi dunia, maupun akibat dampak dari krisis keuangan dunia. Respon yang diberikan pemerintah pun menyerahkan kepada masyarakat penciptaan kerja bagi mereka sendiri, yang pada akhirnya memilih mengembangkan kewiraswastaan. Bagi pemerintah yang masih memiliki ruang anggaran ada yang mendukung pengembangan kewiraswastaan itu melalui program-program PPK. Ada juga yang secara total mendukung pengembangan kewiraswastaan dengan menjadikannya sebagai strategi pembangunan ekonomi.

Pada posisi seperti itu kiranya pemerintah memang harus bersikap rasional, yaitu harus mengambil peran yang aktif dalam pengembangan kewiraswastaan dalam bentuk dukungan pada program-program PPK. Sebab program-program PPK diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat (dari mencari kerja menjadi mencipta kerja), menyediakan ketrampilan berbasis pengetahuan kewiraswastaan, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi berkembangnya jiwa kewiraswastaan. Sayangnya, Pittaway & Cope (2007) belum menemukan bukti yang cukup tentang keberhasilan peran pemerintah itu dalam program-program PPK, baik untuk tingkat lokal, regional, dan nasional. Sehingga intervensi kebijaksanaan pemerintah dalam program-program PPK, meski diakui penting, namun masih perlu selektif dalam implementasinya. Meskipun harus diakui juga, temuan Pittaway & Cope (2007) itu hanya didasarkan pada penelitian-penelitian tentang peran pemerintah dalam pengembangan kewiraswastaan yang masih relatif belum berkembang.

Ada banyak ragam peran yang bisa diambil pemerintah dalam mendukung pengembangan kewiraswastaan, mulai dari yang unik hingga yang bersifat umum. Dalam hal pemerintah menjadikan kewiraswastaan sebagai strategi pembangunan ekonomi, misalnya, pemerintah dapat bertindak sebagai pelopor (*champion*) dengan menjadikannya sebagai agenda nasional, atau lebih jauh lagi memasukkannya dalam perencanaan pembangunan nasional (Peña et al, 2010). Dalam bentuk lain, pemerintah bisa menyusun kerangka kebijaksanaan dalam rangka menciptakan konteks atau lingkungan yang mendukung berjalannya program PPK, misalnya memasukkan topik kewiraswastaan dalam kurikulum pendidikan atau dibentuk lembaga khusus (Pittaway and Cope 2007). Kalaupun tidak “menitipkan” dalam kurikulum pendidikan, pemerintah bisa langsung membuat kurikulum program PPK, kemudian kurikulum itu dilatihkan kepada para instruktur yang akan menjadi pelatih-pelatih professional ketika mereka diterjunkan ke lapangan untuk melatih para calon wiraswastawan (Nelson & Johnson, 1997; Farstad, 2002).

Pemerintah juga bisa berperan sebagai penyandang dana untuk membiayai program-program PPK (Martin et al, 2013). Pemerintah Malaysia, misalnya, membuat lembaga-lembaga pembiayaan teknologi, yang tujuannya mendukung para pebisnis teknologi. Salah satunya adalah pembentukan lembaga modal ventura yang diberi tugas mendorong investasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi. Karena perusahaan seperti ini, biasanya mempunyai kesukaran mendapatkan pendanaan diawal pertumbuhannya (Ajagbe & Ismail, 2014).

Mekipun pemerintah dapat mengambil peran yang luas dan dominan dalam pelaksanaan program-program PPK, seperti diungkapkan para pakar di atas, namun Cho & Honorati (2013) memberikan catatan kritisnya. Menurut mereka, seperti kebiasaan pemerintah, pelaksanaan yang langsung dan eksklusif sering kali tidak memberikan hasil yang diharapkan. Sudah terlalu banyak cerita program-program yang diselenggarakan berakhir dengan kegagalan. Ini pun masih baik, kalau kegagalan itu tidak dibarengi dengan korupsi. Dana yang disediakan untuk membiayai program PPK, misalnya, bisa dikorupsi diberbagai lini.

Karena itu Cho & Honorati (2013) menyarankan sekaligus menanggapi temuan Pittaway & Cope (2007), agar implementasi program-program PPK efektif, sebaiknya pemerintah melibatkan berbagai masyarakat, seperti konsultan, praktisi kewiraswastaan dan lembaga-lembaga pelatihan. Atau pemerintah bisa mengambil peran lain yang lebih spesifik, seperti sebagai pemantau dan evaluator program, kolaborator dan integrator berbagai program PPK yang disediakan para penyedia jasa, atau sebagai pihak yang mengumpulkan berbagai pengalaman praktis untuk bisa dibagikan kepada penyedia program (Volkman, 2009).

2.5. Efektivitas Program PPK

Membahas masalah efektivitas program PPK, sebenarnya lebih menyulitkan. Sebab, jangankan mencari kata sepakat tentang efektivitas program PPK, persoalan apakah kewiraswastaan bisa diajarkan atau tidak saja, sampai saat ini jawaban masih menjadi perdebatan seru. Jika pertanyaan itu diajukan kepada pelopor kewiraswastaan di kalangan wanita miskin Bangladesh, Muhammad Yunus (Yunus, 1999), dia akan memilih kewiraswastaan tidak bisa diajarkan, namun memanfaatkan ketrampilan yang dimiliki seseorang, kemudian melengkapinya dengan memberi bantuan akses ke keuangan, akan membuat pelatihan kewiraswastaan bisa memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi peserta pelatihan kewiraswastaa itu untuk memperoleh keberhasilan.

Dengan demikian, tentu dalam pembicaraan selanjutnya tentang efektivitas program PPK ini dipastikan akan didapati banyak pendapat dan sanggahan. da Costa (2018), misalnya, menyatakan secara historis, pelatihan kewiraswastaan yang dibawakan dalam bentuk perkuliahan (*teaching*) dan pembelajaran (*learning*) belum ada bukti efektivitasnya, akibat minimnya monitoring di pasar tenaga kerja. Maksudnya, sedikit sekali dilakukan monitor atas alumni peserta pelatihan kewiraswastaan, apakah setelah mendapatkan pelatihan kewiraswastaan peserta memperoleh manfaat dari pelatihan tersebut yang dibuktikan dengan,

misalnya, mendirikan perusahaan, perusahaan yang sudah dimiliki kian maju, atau pengelolaan perusahaan yang sudah ada kian profesional.

Di mata Cho & Honorati (2013), apa yang dikeluhkan da Costa (2018) kemungkinan terjadi akibat pelatihan kewiraswastaan hanya ditangani oleh pemerintah, tanpa melibatkan organisasi yang secara profesional memang menyelenggarakan pelatihan kewiraswastaan. Jika pemerintah ber-*partner* dengan pihak lembaga profesional, masih ada kemungkinan pelaksanaan pelatihan kewiraswastaan menajadi efektif.

Efektivitas dengan syarat seperti diungkapkan Cho & Honorati (2013) dan Yunus (1999) juga diakui Martin et al (2013). Menurutnya, pelatihan kewiraswastaan hanya efektif untuk memromosikan koginisi dan memotivisi peserta dalam hal membangun usaha rintisan. Inipun masih dibatasi oleh terbatasnya bukti bahwa pelatihan kewiraswastaan berpengaruh pada kompetensi kewiraswastaan. Jelasnya, pelatihan kewiraswastaan masih sebatas memberikan pemahaman atau mengubah pola pikir, belum sampai pada menumbukan ketrampilan kewiraswastaan. Di mata Gielnik et al (2015), dalam kaitan dengan desain dan perbaikan metode pelatihan dalam rangka memromosikan efektivitas pelatihan kewiraswastaan harus diakui masih terbatas. Karena itu Martinez et al (2010) menyarankan agar materi pelatihan kewiraswastaan diberikan secara lebih bernuansa, dan disampaikan dengan metode yang lebih spesifik.

Untuk pendidikan kewiraswastaan sepertinya studi maupun temuan-temuan tentang efektivitas pendidikan kewiraswastaan cukup memadai. Cukup banyak studi yang didedikasikan untuk mengetahui efektivitas pendidikan kewiraswastaan (Chung, 2018). Meskipun tidak sedikit pula yang menilai efektivitas pengajarannya masih kontroversial (Coleman & Robb, 2012). Sepertinya, pendidikan kewiraswastaan mengikuti saran Cho & Honorati (2013) dan Yunus (1999), bahwa untuk mendapatkan efektivitas pendidikan kewiraswastaan juga memerlukan syarat-syarat tertentu. Jung (2008), misalnya, mencatat untuk mencapai efektivitas pendidikan kewiraswastaan harus menyediakan program praktik yang berbeda dengan program pendidikan kewiraswastaan yang lain.

Program pendidikan formal kewiraswastaan, seperti sekolah bisnis, yang tidak mempertimbangkan motivasi mahasiswanya ketika memilih program tersebut besar juga kemungkinannya tidak akan efektif melahirkan wiraswastawan (Vesper & Gartner, 1997; Lee & Kim, 2016). Sedang program pendidikan kewiraswastaan yang mendesain kurikulumnya dengan mempertimbangkan motivasi dan tujuan mahasiswa akan memperbesar kemungkinan efektivitas pendidikan kewiraswastaan (Hahn & Ko, 2007; Jung & Min, 2008). Hal ini bisa terjadi karena kurikulum dan program menjadi bahan evaluasi utama dalam rangka mendorong sikap dan kesadaran kewiraswastaan mahasiswa dan meningkatkan minat memulai bisnis (Zhang et al, 2014). Itulah sebabnya di banyak pendidikan tinggi yang mengajarkan kewiraswastaan, efektivitas pengajaran diukur dengan minat berwiraswasta (Millman, 2010; Murugesan & Jayavelu, 2015).

Satu hal lagi yang membuat tidak efektifnya program pendidikan kewiraswastaan adalah adanya gap antara pengajar dengan mahasiswa. Cukup banyak bukti yang menunjukkan kurikulum yang dirancang oleh para pengajar kewiraswastaan dianggap tidak penting dan tidak memuaskan mahasiswa. Karena itu, untuk mendapatkan efektivitas yang tinggi, program pendidikan kewiraswastaan hendaknya mengakomodir kurikulum yang memungkinkan mahasiswa memperbaiki pengetahuan dan ketrampilan mereka melalui adaptasi yang terus menerus, baik atas dasar penelitian maupun pengalaman praktik. Sayangnya penelitian dalam bidang pendidikan kewiraswastaan lebih banyak berfokus pada desain dan implementasi, kurang mengakomodasi evaluasi obyektif oleh para praktisi dan mahasiswa sendiri (Pittaway, 2009). Lebih tegasnya, masih sangat kurang evaluasi yang dilakukan pada efektivitas pendidikan kewiraswastaan di tingkat pendidikan tinggi, dan juga analisis mengenai tingkat kepentingan serta kepuasannya belum mencukupi (Dickson, et al, 2008).

2.6. Evaluasi Efektivitas Program PPK

Fakta bahwa kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan semakin melemah, sudah banyak penelitian membuktikannya. Untuk memecahkan masalah inipun, sepertinya sudah menjadi konsensus umum, yaitu mendorong masyarakat untuk menciptakan pekerjaannya sendiri, dan jalan untuk ini adalah menjadi wiraswastawan. Selanjutnya, pemerintah mengambil peran mendorong dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan kewiraswastaan. Sebagai pelengkap, pemerintah juga membuat banyak kebijaksanaan yang memungkinkan lahirnya UMKM. Bahkan sering kali UMKM menjadi tumpuan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kohesi sosial, dan pembangunan (Hyder & Lussier, 2016).

Dengan demikian, kalau diurut dari pangkal ke ujung, rangkaian penciptaan lapangan kerja melalui kewiraswastaan, maka pelatihan kewiraswastaan menjadi pangkal rangkaian. Dari pembahasan sebelumnya, sudah banyak argumen yang menyatakan pentingnya pelatihan kewiraswastaan, begitu pula peran pemerintah dalam mendukung pelatihan kewiraswastaan tersebut, sudah cukup intens dan banyak. Penelitian tentang PPK juga tidak kalah intensif. Namun semua upaya itu masih meninggalkan pekerjaan yang tak kalah penting, yaitu masih sedikit penelitian maupun tindakan yang ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas program PPK (Dladla & Mutambara, 2018). Dari pembahasan mengenai efektivitas program PPK di atas, juga masih menyisakan perdebatan tentang efektivitas program PPK tersebut. Beruntung masih ada temuan yang menunjukkan bahwa program PPK akan menjadi efektif jika dipenuhi syarat tertentu. Jadi untuk memastikan program PPK berjalan efektif, mengevaluasi efektivitasnya menjadi kebutuhan mendesak (Curran & Stanworth, 1989; Gibb, 1987; Block & Stumpf, 1992; Cox, 1996; Young, 1997; Henry et al, 2003: 102; Storey, 2000).

Dalam banyak literatur, definisi dominan tentang evaluasi yang dituliskan para ahli adalah mendapatkan informasi dalam rangka untuk membuat penilaian atas suatu program pelatihan (termasuk pendidikan), seperti perlunya perubahan atau menghentikan sama sekali suatu program. Williams (1976), misalnya, mendefinisikan evaluasi sebagai penilaian atas manfaat.

Definisi yang dibuat Harper & Bell (1982) merefer pada mengoleksi, memeriksa, dan menganalisis informasi secara terencana, sehingga memungkinkan dilakukan pertimbangan tentang nilai dan manfaat suatu program pelatihan. Goldstein (1993), mendefinisikan evaluasi sebagai mengoleksi diskripsi dan pertimbangan secara sistematis atas informasi guna membuat keputusan yang efektif yang berkaitan dengan pemilihan, adopsi, penilaian dan modifikasi berbagai kegiatan instruksional. Tak kalah pentingnya definisi yang dibuat oleh Lewis & Thornhill (1994), yaitu evaluasi pelatihan adalah proses untuk mencoba menilai manfaat total dari pelatihan, yang meliputi biaya, manfaat, dan hasil yang bermanfaat bagi organisasi, dan juga menilai perbaikan kinerja setelah mendapat pelatihan.

Ada dua alasan kuat yang mendukung pentingnya evaluasi efektivitas program PPK. *Pertama*, menyelenggarakan program PPK sangatlah mahal biayanya, baik dalam arti keuangan maupun waktu yang dicurahkan untuk mengerjakan program tersebut. Biaya tersebut harus ditanggung oleh peserta program maupun sponsor (sebagian besar adalah pemerintah). *Kedua*, manfaat program PPK sering kali tidak bisa dinikmati para peserta. Bisa karena materi PPK tidak sesuai dengan kebutuhan nyata peserta (biasanya dirasakan oleh peserta dari kalangan praktisi), atau karena pelaksanaan program PPK itu hanya memenuhi program kerja pemerintah, sehingga partisipasi peserta seperti dipaksakan. Yahya et al (2012), misalnya, menemukan para wiraswastawan dari kalangan UMKM tidak melihat program PPK sebagai hal yang penting, dan tidak merasakan adanya nilai tambah bagi diri dan bisnis mereka. Bahkan Sewgambar (2015), yang memberi gelar para wiraswastawan UMKM ini sebagai *survivalist* (wiraswastawan yang hanya tergantung pada pendapatan harian, tanpa adanya dukungan dari luar) menganggap PPK hanya membuang-buang waktu (dibanding bekerja dan memperoleh pendapatan harian, yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi segera).

Namun, tentu tidak semua program PPK menemui hasil yang tidak efektif seperti itu. Ranyane (2014), misalnya, dengan studinya tentang efektivitas PPK dengan kinerja UMKM di Negeria, menunjukkan 49% dari 51% peserta PPK yang menghadiri kegiatan menunjukkan bisnis

mereka berjalan dengan baik. Sebaliknya, 60% dari peserta yang tidak hadir, melaporkan kinerja bisnisnya tidak sebaik mereka yang hadir mengikuti PPK. Hasil ini tentunya memberi harapan bahwa program PPK bisa memberikan hasil yang baik, jika bisa berjalan efektif. Di sinilah pentingnya melakukan evaluasi efektivitas PPK.

2.7. Model¹⁶ Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kewiraswastaan

Teori yang mendasari evaluasi efektivitas pelatihan dikenal sebagai *Theory of Change* (teori perubahan), yang dikembangkan Weiss (1995)¹⁷. Teori ini dianggap relevan karena tidak hanya mengevaluasi apakah suatu program pelatihan efektif, tetapi juga mengevaluasi apakah metode yang digunakan juga efektif? (Allen et al, 2017; Breuer et al, 2016). Godtfredsen (1997), misalnya, menyatakan mengukur sukses kewiraswastaan lebih baik menggunakan indikator kualitas *business plan*, dari pada menggunakan ujian tertulis di akhir tahun. McMullan & Boberg (1991) meneliti mana diantara metode studi kasus atau metode proyek yang lebih efektif untuk mengajar kewiraswastaan mahasiswa MBA di Universitas Calgary. Hasilnya menunjukkan mahasiswa dan alumni sekolah tersebut merasa lebih efektif menerima materi kuliah jika disampaikan dengan metode studi kasus dari pada metode proyek.

Pada akhirnya, selain perdebatan tentang bisa tidaknya kewiraswastaan diajarkan, kini dalam hal evaluasi efektivitas program PPK muncul perdebatan baru, yaitu tentang metode dan indikator yang digunakan (Westhead et al, 2001). Pastinya, tidak ada metode standar yang bisa digunakan, dan juga kriteria evaluasi (indikator) yang bisa menentukan efektivitas evaluasi program PPK (Henry et al, 2003), seperti yang sudah ditunjukkan Godtfredsen (1997) dan

¹⁶ Dalam pembahasan mengenai efektivitas evaluasi, istilah model sering kali bertukar tempat dengan istilah metode. Karena yang paling populer adalah model evaluasi Kirkpatrick, maka penelitian ini mengikuti menggunakan istilah model

¹⁷ Sebenarnya pengembang teori ini tidak hanya Carol Weiss saja. Mereka yang punya andil diantaranya, Huey Chen, Peter Rossi, Michael Quinn Patton

McMullan & Boberg (1991). Stufflebeam & Shinkfield (2007) dan House, 1987), mencatat tak kurang dari 26 model evaluasi.

Seperti biasa terjadi dalam perdebatan ilmiah, tentu selain mereka masih banyak lagi pendapat tentang metode dan indikator dalam mengevaluasi efektivitas program PPK ini. McMullan et al (2001: 38), misalnya, memberikan indikator efektivitas program PPK secara lugas, yaitu standar tujuan bisnis, seperti menghasilkan dan menumbuhkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan keuntungan. Fayolle et al (2006) mengajukan usulan, paling tidak ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi efektivitas program PPK, yaitu menyeleksi kriteria dan efektivitas pengukurannya, yang keduanya dikaitkan dengan variabel waktu dan konteks. Berkaitan dengan kriteria, evaluasi bisa ditekankan pada ketrampilan dan pengetahuan spesifik yang bisa diperoleh peserta, dan mengukur seberapa baik peserta telah memahami kunci-kunci teknis dan konsep. Hal lain bisa dimasukkan sebagai pengukuran antara lain ketertarikan, kesadaran, dan minat peserta. Untuk ukuran kepuasan, pengukuran klasik yang biasa digunakan adalah tingkat kehadiran, partisipasi aktif dan motivasi peserta. Pengukuran lain yang penting adalah penilaian tak lama setelah mengikuti program (misalnya, tiga hari setelah program berjalan). Demikian juga dengan pengukuran perkembangan kinerja di berbagai tingkatan, seperti manajemen proyek, kerja tim, kapasitas kreativitas, dan lain sebagainya).

Vesper & Gartner (1997) sepakat dengan penentuan kriteria, tersebut. Karena itu mereka mengusulkan 18 kriteria evaluasi yang diperingkat berdasar pendapat para ahli. Lima kriteria teratas adalah, jumlah kursus yang ditawarkan, publikasi para instruktur, dampak bagi komunitas, perusahaan yang didirikan, dan hasil inovasi. Menurut Clark et al (1984), kriteria evaluasi seperti itu lebih didasarkan pada *input*. Ini tidak salah, dan memang banyak kriteria evaluasi dibuat seperti ini. Dia justru menemui kenyataan sangat sedikit kriteria evaluasi yang mendasarkan pada *output*, seperti keberhasilan peserta mendirikan bisnis dan menjalankannya. Fleming (1996) dan Barrow & Brown (1996), merasakan pentingnya mengevaluasi efektivitas program PPK melalui penelusuran jejak peserta selama mengikuti PPK. Oleh karena itu mereka mengusulkan

adanya studi longitudinal dalam bidang evaluasi efektivitas program PPK ini. Lebih lanjut Garavan & O'Connell (1994: 5) dan Storey (2000) menyarankan, disamping menggunakan metode studi longitudinal dalam evaluasi efektivitas program PPK, juga menggunakan kelompok kontrol (*control group*), yaitu dengan membandingkan antara mereka yang sudah mengikuti program PPK dengan mereka yang tidak pernah mengikutinya. Hytti et al (2002) mencatat lebih banyak studi tentang evaluasi efektivitas program PPK yang fokus pada indikator usaha (*input*) daripada dampak (*output*). Studi yang fokus pada *input* ini, misalnya yang menggunakan kriteria evaluasi seperti konten kurikulum, pendekatan pengajaran, atribut fasilitator, dan lain sebagainya. Sedangkan yang fokus pada *output*, seperti jumlah perusahaan yang berhasil didirikan, peningkatan jumlah karyawan, dan peningkatan nilai keuntungan peserta PPK.

Dari perdebatan ini, dapat dipahami kalau mengevaluasi efektivitas program PPK memanglah sulit. Namun, yang pasti evaluasi tersebut memiliki banyak metode, kriteria evaluasi, dan indikator, dan ini lebih menyulitkan lagi. Meskipun sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu fokus pada *input* dan fokus pada *output (outcome)*. Sebenarnya, dalam praktiknya, kedua fokus tersebut sering kali digunakan secara bersama-sama dan saling melengkapi. Kondisi ini membuka peluang untuk menciptakan model evaluasi khusus untuk pelatihan kewiraswastaan Metode CEFE.

2.8. Penelitian Terdahulu

Meskipun menurut Valerio et al (2015) penelitian di bidang evaluasi efektivitas program PPK belum banyak, namun cukup memadai untuk memotret hasil-hasil penelitian tersebut. Dari yang tidak banyak itu pun, Gibb (1997) meragukan adanya jawaban pasti atas tersedianya metode mengevaluasi efektivitas program PPK, dalam arti analisis biaya manfaat (manfaat yang didapat dari pelatihan dibanding biaya yang dikeluarkan). Wyckham (1989) memperkuat keraguan Gibb dengan catatannya bahwa sulit mengidentifikasi pengukuran hasil pelatihan yang tepat dan juga menentukan penyebabnya.

Selanjutnya, dari penelitian yang belum banyak itu, sebagian besar menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur dampak dari variabel PPK terhadap berbagai variabel yang dianggap memiliki kaitan dengan program PPK, terutama hasil dari PPK. Dalam pengukuran relasi program PPK dengan berbagai variabel tersebut, juga masih dilengkapi dengan berbagai variasi, seperti menguji variabel moderator, mediator, dan membedakan jender. Ordaz et al (2016), misalnya, meneliti peran jender dalam mempengaruhi minat berwiraswasta. Kemudian Yousif & Mohammad (2018), menempatkan variabel lingkungan bisnis sebagai moderator hubungan antara ketrampilan kewiraswastaan dengan kinerja UMKM.

Variabel lain yang banyak menarik perhatian para peneliti adalah persepsi yang dikaitkan dengan kemungkinan seseorang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan kewiraswastaan (Györfy, 2014; Koellinger et al, 2013). Sementara itu, yang menempatkan hasil program PPK (*outcome*) sebagai variabel dependen diantaranya (van der Sluise et al (2005); Haase & Lautenschläger, 2011; Unger et al, 2011). Meskipun sudah ada yang secara langsung mengukur hasil program PPK, namun menurut Glaub & Frese (2011) secara metodologi masih lemah. Selain secara metodologi masih lemah, hasil yang didapat juga masih belum jelas. Sebagai misal, penelitian yang menempatkan program PPK sebagai variabel independen yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap minat berwiraswasta menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek (Lüthje & Franke 2003; Lee et al, 2005; Fayolle et al, 2006; Souitaris et al, 2007). Sementara studi-studi yang sama, yang berhasil dirangkum oleh Haase & Lautenschläger (2011) justru memberi hasil yang tidak signifikan. Bahkan Oosterbeek et al, (2010) mendapatkan hasil negatif pengaruh program PPK terhadap minat berwiraswasta.

Temuan lain ditunjukkan oleh Pittaway & Cope (2007), dimana dampak program PPK terhadap hasil program tersebut, seperti minat berwiraswasta dan juga berkegiatan kewiraswastaan (misalnya, memulai bisnis) adalah lemah. McKenzie & Woodruff (2012) mendapati pengaruh program PPK terhadap hasil-hasil yang diinginkan, seperti terhadap keberlanjutan perusahaan yang sudah ada (*survivorship of existing firms*), adalah relatif hanya

biasa saja (*modest*), sedang pengaruhnya terhadap penjualan dan keuntungan hanya sedikit yang signifikan. Meta analisis yang dilakukan Martin et al (2013), membedakan dampak program pendidikan kewiraswastaan (secara akademik) dengan program pelatihan kewiraswastaan. Hasilnya terdapat perbedaan dampak diantara kedua metode itu.

Ogundeji (1991), bisa disebut sebagai salah satu sarjana yang memulai menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian tentang evaluasi efektivitas program PPK. Dia melakukan penelitian terhadap tiga pendekatan evaluasi yang ada dalam literatur evaluasi efektivitas program PPK, yaitu kualitas penyebab efektivitas program, kualitas penilaian, dan kualitas pengawasan. Hasil yang diperoleh dari studi itu adalah, pendekatan kualitas penyebab dan kualitas penilaian menunjukkan efektivitas yang baik dalam penyelenggaraan program PPK. Selanjutnya, kualitas pengawasan memperkaya efektivitas yang ditunjukkan oleh kualitas penyebab dan kualitas penilaian.

Plant & Ryan (1994), melakukan studi praktik evaluasi efektivitas program PPK yang di buat oleh Kirkpatrick¹⁸. Hasilnya menunjukkan, meski model yang dibuat Kirkpatrick terbukti bermanfaat untuk melakukan evaluasi, namun tidak menunjukkan hasil yang realistis. Alasannya adalah kurangnya kesadaran tentang evaluasi hasil pelatihan di kalangan komunitas pelatihan, situasi ekonomi yang kekurangan, dan kurangnya anggaran pelatihan. Akhirnya Plant & Ryan, menyarankan menggunakan metode lain untuk mengukur efektivitas pelatihan.

Temuan serupa banyak ditunjukkan oleh peneliti lain, dan seperti kajian terhadap model Kirkpatrick ini mendominasi penelitian tentang evaluasi efektivitas program PPK, terutama pelatihan kewiraswastaan. Hatton (2003), misalnya, menemukan meskipun model yang dibuat

¹⁸ Kirkpatrick merupakan pelopor evaluasi program PPK. Pada akhir tahun 1950 an, Kirkpatrick mengembangkan model evaluasi pelatihan, yang dengan cepat menjadi terkenal dan diadopsi oleh berbagai macam organisasi di dunia (diterbitkan sebagai buku pertama kali tahun 1967, edisi terbaru terbit tahun 2016). Model evaluasi tersebut disempurnakan pada tahun 1999. Model ini pada intinya mengukur empat kategori hasil, yaitu: (1). reaksi pembelajar (peserta pelatihan). (2) belajar (prinsip, fakta, dan teknik yang bisa difahami dan diserap oleh peserta pelatihan. (3) perilaku peserta pelatihan. (4) hasil bisnis.

Kirkpatrick diakui amat populer, namun belum mencukupi. Menurutnya, model evaluasi mestinya bisa dibuat lebih kreatif dan multidimensional melalui persediaan informasi subyektif yang kaya dan menghindari data yang berlimpah. Atas dasar anggapan ini, Hatton berkesimpulan bahwa meski secara teori diakui evaluasi diperlukan tetapi sejatinya evaluasi sudah dilakukan dengan sendirinya oleh tuntutan pihak luar. Bahkan pihak luar itulah sebagai tolok ukurnya. Hatton menyarankan, agar evaluasi menjadi efektif, evaluasi itu harus direncanakan dan perencanaan itu harus berangkat dari pertanyaan-pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana pelatihan?

Berikutnya Holdnak et al (2007), mengaji keterbatasan model evaluasi Kirkpatrick dengan membandingkannya dengan metode *Solomon Four Group Experimental Design*, dengan obyek penelitian tentang studi lapangan pelatihan penghargaan pada diri sendiri (*self esteem*). Hasil kajian menunjukkan model Kirkpatrick tidak mencukupi kebutuhan kalau hanya digunakan untuk mengukur efektivitas, dan hanya sedikit fokus yang diberikan pada tujuan pelatihan. Sebaliknya, meski metode *Solomon Four Group Experimental Design* melebihi model Kirkpatrick, namun metode memiliki keterbatasan juga, yaitu sulit dipraktikkan dan secara biaya tidak efektif.

Menyadari bahwa pelatihan membutuhkan biaya yang besar, Endres & Kleiner (1990) mendorong adanya evaluasi untuk setiap program pelatihan. Masalahnya, cukup banyak model dan pendapat untuk melakukan evaluasi itu. Dari yang banyak itu, model Kirkpatrick adalah yang paling luas penerimaannya. Seperti diketahui model Kirkpatrick mengukur empat kategori, yaitu reaksi, belajar, perubahan perilaku dan hasil. Dari keempat kategori Endres & Kleiner menemukan reaksi emosional dan peningkatan pengetahuan merupakan komponen kunci evaluasi keunggulan pelatihan. Namun, sayangnya dari keempat kategori itu juga ditemukan tidak diperlukannya syarat keseimbangan diantara keempat kategori tersebut, sehingga dapat disimpulkan penggunaan rumus tunggal sebagai alat ukur tidak akan efektif. Akhirnya penelitian ini mencatat hal penting untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu mengembangkan desain model yang lebih tepat, mengenalkan teknik yang kreatif dan peran organisasi, lingkungan, manajer dan pelatih juga harus dipertimbangkan.

Kesadaran yang sama juga dirasakan Attia & Honeycutt (2011), ketika mendapati perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menginvestasikan dana yang besar pada pelatihan penjualan. Karena itu evaluasi efektivitas pelatihan itu harus dilakukan, agar dapat diketahui apakah program pelatihan tersebut memberikan hasil seperti yang diinginkan? Kembali metode evaluasi yang digunakan adalah model Kirkpatrick, tetapi hanya mengambil dua kategori, yaitu perubahan perilaku dan hasil. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dua evaluator, yaitu pengawas dan diri sendiri¹⁹. Sebelum evaluasi dilakukan, ada pekerjaan pendahuluan berupa analisis, identifikasi tujuan, dan seleksi konten maupun topik. Hasilnya menunjukkan evaluasi oleh pengawas atau pihak lain yang berstatus sebagai atasan memberi informasi yang lebih mantap dibanding jika evaluasi dilakukan oleh diri sendiri. Kerbatasan menggunakan model Kirkpatrick ditemukan, yaitu sulit mengumpulkan data untuk kepentingan evaluasi.

Kritik kembali muncul atas model Kirkpatrick, kali ini disampaikan Cunningham (2007). Meski sama dengan peneliti lain, mengakui bahwa model Kirkpatrick dapat diterima secara luas, namun dalam praktiknya tidak mudah untuk diaplikasikan. Alasan yang paling mengemuka sama seperti yang disampaikan Endres & Kleiner (1990), yaitu tidak adanya kredibilitas diantara empat kategori²⁰. Sebagai contoh, dalam kasus yang diteliti Cunningham (2007) ditemukan, meskipun para peserta merasa tidak bahagia selama pelatihan namun perilaku mereka bisa berubah sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Memang sebagian besar organisasi menggunakan dua kategori pertama, namun tidak lebih dari itu. Untuk melengkapinya Cunningham (2007) menggunakan pendekatan berbeda, yaitu daripada mendapatkan *feed back* dari para peserta (reaksi dan belajar), maka penelitian dilanjutkan dengan mendapatkan informasi dari para manajer²¹ dan sponsor program pelatihan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran hasil

¹⁹ Dengan menanyai langsung para peserta pelatihan

²⁰ Istilah yang dipakai Endres & Kleiner (1990), tidak diperlukannya syarat keseimbangan diantara keempat kategori

²¹ Maksudnya atasan dari para peserta

dari program pelatihan dan menunjukkan nilai pelatihan kepada pemangku kepentingan. Konsekuensinya, penelitian ini menjadi tidak standar.

Tentu tidak semua hasil penelitian efektivitas evaluasi pelatihan menggunakan model Kirkpatrick berakhir dengan kritik pada model ini. Tidak sedikit juga peneliti justru mengapresiasi dengan menghadirkan bukti-bukti positif. Steensma & Groeneveld (2010), misalnya, mendapatkan hasil yang positif ketika melakukan studi dengan desain eksperimental pada kinerja peserta pelatihan, dengan model evaluasi Kirkpatrick. Studi dilakukan dengan membagi peserta pelatihan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasilnya menunjukkan model Kirkpatrick bisa digunakan dengan baik, dan kinerja peserta pelatihan kelompok eksperimen lebih baik dibanding kelompok kontrol.

Berikutnya, Berg & Karlsen (2011), melakukan evaluasi terhadap program pelatihan dan manajemen. Evaluasi yang digunakan tentu model Kirkpatrick. Studi menggunakan wawancara mendalam, survei, dan observasi. Selain itu, data tambahan dimasukkan dari sumber atasan dan bawahan peserta pelatihan. Hasilnya menunjukkan, model Kirkpatrick bisa bekerja dengan baik, peserta pelatihan bisa menikmati proses belajar (*learning*) selama pelatihan. Namun, temuan juga menunjukkan kategori keempat (hasil) untuk organisasi tidak bisa dieksplorasi lebih lanjut.

Passmore & Velez (2012), masih melanjutkan kritik pada model Kirkpatrick, namun mereka juga melakukan hal yang sama terhadap model lain. Mereka juga mengakui model Kirkpatrick dan Philips paling luas penggunaannya, meski dapat pula diabaikan. Passmore & Velez mengevaluasi berbagai model praktis dan kokoh untuk mengevaluasi organisasi sumber daya manusia (*human resource*) dan para praktisi. Model-model tersebut adalah model Kirkpatrick, model Kaufmann dan Keller, model CIRO, model CIPP, model Philips ROI, IPO model of Bushnell, dan Success Case methods of Brinkerhoff. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, model-model itu, terutama Kirkpatrick dan Philips, mendapat penerimaan yang luas, namun bisa diabaikan juga. Karena itu, Passmore & Velez mengusulkan model baru yang dikenal sebagai SOAP –M model (Self, Other, Achievements, Potential, Meta-analysis).

Tentu tidak semua peneliti tertarik pada model dominan seperti model Kirkpatrick. Massey (2004), misalnya, meneliti tentang investasi pada pelatihan kewiraswastaan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan di New Zealand. Dari kedua kasus investor tersebut menunjukkan, investasi pada pelatihan tidak menunjukkan adanya hasil meningkatkan kinerja individual, sehingga tidak memberikan kontribusi pada pertumbuhan organisasi dan ekonomi nasional. Hal ini terjadi karena investasi tersebut berangkat dari pemikiran bahwa investasi pada pelatihan kewiraswastaan merupakan strategi pengembangan kewiraswastaan. Hal ini keliru, sebab mestinya pelatihan kewiraswastaan dipandang sebagai kunci strategi yang mengembangkan dan fokus harus diberikan pada investasi dan juga evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

Short (2009) mengenalkan konsep *vacum*, yaitu konsep *gap* antara peristiwa belajar aktual (*actual learning event*) dengan realisasi manfaat yang dihasilkan. Dengan menggunakan tiga kasus, studi menemukan sembilan faktor yang paling mempengaruhi evaluasi model *vacum*. Kesembilan faktor tersebut adalah: waktu untuk pelatihan, tingkat dan jenis belajar, jumlah proyek, masalah kualitatif dan kuantitatif yang dilibatkan, jumlah orang yang terlibat, definisi tujuan, variabel tidak langsung, konten dan volume permintaan belajar, dan ketidakmampuan memisahkan belajar dari pengetahuan *tacit* atau pengalaman yang luas. Studi menemukan, alasan utama mengapa evaluasi atas pelatihan diabaikan adalah tekanan pekerjaan rutin, dan kurangnya waktu atau minimnya pengetahuan tentang bagaimana mengevaluasi pelatihan. Atas dasar temuan ini, penelitian merekomendasikan *vacum*nya evaluasi harus diminimumkan.

Penelitian tentang dampak personal atas efektivitas pelatihan modal ketegasan dan psikologis dilakukan Demerouti et al (2010). Metode yang digunakan adalah dengan memonitor perubahan sebelum dan sesudah pelatihan. Monitoring efektivitas pelatihan dilakukan dengan cara mendapatkan laporan diri sendiri (*self reported*) dari para peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Selanjutnya laporan diri sendiri itu dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh kenalan atau peserta lain. Untuk mengukur perubahan positif para peserta, model Luthan's

PsyCap²² digunakan. Hasilnya menunjukkan kedua modal, ketegasan dan psikologis, meningkat setelah pelatihan.

Menyambung Short (2009), Griffin (2010) juga mempersoalkan minimnya perhatian pada masalah evaluasi atas efektivitas pelatihan. Padahal secara luas diakui, pelatihan memegang peran penting dalam mengembangkan individu maupun organisasi. Selain minimnya perhatian pada evaluasi, model evaluasinya juga masih banyak memiliki kelemahan. Tentu Griffin tidak asal mengeritik, dia mengajukan usul agar model evaluasi mengedepankan pendekatan sistematis dan logis, serta dapat digunakan secara praktis untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan program dan kondisi organisasi. Untuk mengatasi *gap* antara kebutuhan organisasi dengan lemahnya model dan minimnya evaluasi, Griffin mengusulkan lima langkah yang terdiri, kondisi sebelum pelatihan, memperhitungkan faktor konteks, pemanfaatan kerangka kerja produktivitas untuk mengidentifikasi *input* dan *output* belajar yang akan membawa dampak, koleksi dan analisis data, dan identifikasi *benchmark* program pembelajaran.

Herrero, et al (2011) menganalisis dan mengevaluasi desain, struktur dan konten perencanaan pelatihan. Analisis dan evaluasi dilakukan atas *questioner* yang dibuat khusus untuk maksud tersebut. Metode itu digunakannya untuk mengevaluasi pelatihan pada tenaga kesehatan profesional atas penggunaan obat secara rasional. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif pada perbaikan perilaku profesional para peserta pelatihan dalam memilih obat secara rasional. Namun dampak positif itu hanya terjadi pada setengah dari para peserta tenaga profesional kesehatan. Ini mengindikasikan, pentingnya perbaikan lebih lanjut desain, struktur, dan pengembangan program pelatihan.

Ghosh, et al (2011) mengevaluasi program pelatihan yang dilakukan dengan cara transmisi dan distribusi di India, dan para pesertanya diambil dari kalangan staf manajerial dan

²² PsyCap (Psychological Capital) model adalah untuk mengukur perubahan psikologi yang terdiri empat pilar: Hope, Efficacy, Resilience, dan Optimism (HERO). Model ini dikembangkan oleh Fred Luthan (2004)

staf non manajerial. Metode evaluasi yang digunakan adalah mengukur reaksi para peserta pelatihan atas efektivitas program pelatihan dengan menggunakan *questioner* yang berisi pertanyaan terbuka dan tertutup. Hasilnya menunjukkan ada perbedaan tingkat kepuasan atas pelatihan tersebut diantara peserta staf manajerial dan staf non manajerial. Kelemahan penelitian ini adalah ada peserta yang dikeluarkan dari evaluasi, padahal sebelumnya peserta ini dimasukkan sebagai bagian evaluasi. Selain itu respons atas pertanyaan terbuka sangat minim, sehingga bisa mengurangi kelengkapan dan kedalaman informasi.

Evaluasi pelatihan di industri kesehatan kembali dilakukan oleh Robertson, et al (2013). Evaluasi dilakukan di bagian perawatan tingkat tinggi untuk pasien yang memiliki prevalensi trauma dan melukai diri sendiri. Para peserta pelatihan yang dievaluasi adalah para staf yang terlibat menangani pasien dengan risiko penyakit tersebut. Pelatihan tersebut adalah *the trauma and self injury training* (TASI). Evaluasi dilakukan dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Temuannya adalah staf yang mendapatkan pelatihan, tingkat kepercayaan diri, kompetensi, dan tingkat pemahamannya meningkat. Sayangnya studi ini tidak melibatkan staf yang tidak mengikuti pelatihan sebagai kontrol, sehingga dapat dibandingkan diantara keduanya. Sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang kokoh.

Rowe (1996) mencoba membedakan evaluasi dalam bentuk monitoring (*single loop learning*) dan evaluasi (*double loop learning*). Setelah membedakan, kemudian membandingkan hasil kedua bentuk evaluasi itu. Kesimpulannya evaluasi lebih penting dari pada monitoring.